Profil Perkembangan Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng

Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas waranugraha-Nya penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Buleleng Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan maksud dan tujuan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Profil perkembangan kependudukan ini berisi informasi mengenai gambaran kuantitas, kualitas, mobilitas penduduk serta kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan sipil penduduk kabupaten Buleleng berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Semester I dan II (Januari sampai dengan Desember 2019).

Buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (4) UU nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa data kependudukan digunakan untuk semua keperluan: pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Selesainya penyusunan buku profil ini merupakan hasil kerja Tim dan masukan dari banyak pihak terkait. Kami menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan agar kedepan data, analisa, interpretasi dalam buku ini semakin baik.

Singaraja, Mei 2020

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Buleleng

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos, M.A.P

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19720809 199201 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan 5

1.3 Ruang Lingkup 5

1.4 Pengertian umum terhadap istilah yang digunakan dalam Profil Perkembangan Kependudukan 6

BAB II GAMBARAN UMUM DAN POTENSI DAERAH KABUPATEN BULELENG

2.1 Letak Geografis, Tofografis dan Iklim 7

2.2 Wilayah Administrasi 10

2.3 Kondisi Demografis 11

2.4 Gambaran Ekonomi Daerah 12

BAB III SUMBER DAN JENIS DATA

3.1 Sumber Data 14

3.2 Jenis Data 15

BAB IV PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

4.1 Kuantitas Penduduk 19

4.1.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk 19

4.1.2 Kepadatan Penduduk (Population Density Ratio) 21

4.1.3 Pertumbuhan Penduduk 23

4.1.4 Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi 25

4.1.4.1 Umur Median (Median Age) 26

4.1.4.2 Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) 30

4.1.4.3 Rasio Ketergantungan (Dependency ratio) 33

4.1.5 Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial 38

4.1.5.1 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan 38

4.1.5.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 44

4.1.5.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng Berdasarkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 46

4.1.5.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Kawin 52

4.1.6 Keluarga 54

4.1.6.1 Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga 55

4.1.6.2 Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga 57

4.1.6.3 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur 59

4.1.6.4 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin 60

4.1.6.5 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin 63

4.1.6.6 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenjang Pendidikan 64

4.1.6.7 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Bekerja 66

4.2 Kualitas Penduduk 68
4.2.1 Kesehatan 68
4.2.1.1 Kelahiran (Fertilitas) 68
4.2.1.2 Rasio Anak dan Perempuan 71
4.2.1.3 Kematian (Mortalitas) 73
4.2.1.3.1 Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate-IMR) 73
4.2.1.3.2 Angka Kematian Anak Balita 75
4.2.1.3.3 Angka Kematian Ibu 75
4.2.2 Indikator Pendidikan 76
4.2.2.1 Angka Melek Huruf (AMH) 76
4.2.2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) 78
4.2.2.3 Angka Partisipasi Murni (APM) 80
4.2.3 Ekonomi 82
4.2.3.1 Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja 82
4.2.3.1.1 Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja 82
4.2.3.1.2 Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur atau Pencari Kerja) 84
4.2.3.1.3 Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) 85
4.2.3.1.4 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Bekerja 86
4.2.3.1.5 Pengangguran Terbuka 88
4.3 Mobilitas Penduduk 90
4.3.1 Mobilitas Permanen 91
4.3.1.1 Migrasi Masuk 91
4.3.1.2 Migrasi Keluar 93
4.3.1.3 Angka Migrasi Netto (nett-migration/Mn) 95

4.3.2 Mobilitas Non Permanen 95

BAB V KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

5.1 Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) 99

5.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) 101

5.3 Kepemilikan Akta 105

5.3.1 Akta Kelahiran 106

5.3.2 Akta Perkawinan 110

5.3.3 Akta Perceraian 114

5.3.4 Akta Kematian 117

5.3.5 Akta Pengakuan Anak 120

5.3.6 Akta Pengesahan Anak 122

BAB VI PENUTUP

6.1 Penutup 123

DAFTAR PUSTAKA 126

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Buleleng Tahun 2019 10

Tabel 2 Jumlah dan Proporsi Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2019 menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin 20

Tabel 3 Kepadatan Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2019 22

Tabel 4 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2019 24

Tabel 5 Jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng Berdasarkan Kelompok Umur Lima Tahunan Tahun 2019 28

Tabel 6 Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Penduduk Kabupaten Buleleng Berdasarkan Kelompok Umur Desember Tahun 2019 31

Tabel 7 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Buleleng Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019 32

Tabel 8 Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2019 berdasarkan kelompok Umur Muda, Produktif dan dirinci menurut Kecamatan 34

Tabel 9 Penduduk Kelompok Umur Muda, Produkif dan Tua Kabupaten Buleleng menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 35

Tabel 10 Rasio Ketergantungan penduduk Kabupaten Buleleng dirinci berdasarkan kecamatan Tahun 2019 36

Tabel 11 Rasio Ketergantungan Penduduk muda, tua dan total di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 36

Tabel 12 Jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2019 38

Tabel 13 Distribusi Persentase Penduduk Kabupaten Buleleng berdasarkan tingkat Pendidikan yang ditamatkan dirinci menurut kecamatan Tahun 2019 40

Tabel 14 Jumlah penduduk Kabupaten Buleleng berdasarkan Agama yang dianut dan dirinci berdasarkan Kecamatan Tahun 2019 45
Tabel 15 Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2019..... 47
Tabel 16 Jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng menurut Jenis Kecacatan dan Kecamatan Tahun 2019..... 49
Tabel 17 Data Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Buleleng Tahun 2019 50
Tabel 18 Distribusi Penduduk menurut Status Kawin dirinci menurut Kecamatan Kabupaten Buleleng 2019 52
Tabel 19 Jumlah penduduk, jumlah keluarga, dan rata-rata jumlah keluarga di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 56
Tabel 20 Distribusi Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Status Hubungan Dengan Keluarga (SHDK) Kabupaten Buleleng Tahun 2019..... 58
Tabel 21 Distribusi kepala keluarga menurut kelompok dan status kawin Kabupaten Buleleng Tahun 2019..... 59
Tabel 22 Jumlah Kepala Keluarga menurut Jenis Kelamin per-Kecamatan Tahun 2019..... 61
Tabel 23 Jumlah kepala keluarga berdasarkan status kawin Kabupaten Buleleng tahun 2019. 63
Tabel 24 Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Buleleng Berdasarkan Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2019..... 65
Tabel 25 Distribusi Kepala Keluarga menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Buleleng Tahun 2019 67
Tabel 26 Jumlah Kelahiran Hidup dirinci berdasarkan Kecamatan Kabupaten Buleleng Tahun 2019..... 69
Tabel 27 Rasio Anak dan Perempuan Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2019..... 72
Tabel 28 Jumlah Kematian Bayi Kabupaten Buleleng Tahun 2019..... 73

Tabel 29 Angka Melek Huruf Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2019 77
Tabel 30 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SLTP Kabupaten Buleleng dari tahun 2016 sampai 2019 79
Tabel 31 Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SLTP, dan SLTA di Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019 81
Tabel 32 Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 82
Tabel 33 Jumlah tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin Kabupaten Buleleng tahun 2019 83
Tabel 34 Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 84
Tabel 35 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Buleleng Tahun 2019 85
Tabel 36 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Kabupaten Buleleng Tahun 2019 87
Tabel 37 Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buleleng Tahun 2019 89
Tabel 38 Jumlah Migrasi Masuk Kabupaten Buleleng Tahun 2019 91
Tabel 39 Migrasi Keluar di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 93
Tabel 40 Jumlah Penduduk Pendatang Tidak Menetap di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 97
Tabel 41 Jumlah kepala keluarga dan kepemilikan kartu keluarga di Kabupaten Buleleng tahun 2019 100
Tabel 42 Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 104
Tabel 43 Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Buleleng Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019 106
Tabel 44 Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Buleleng Tahun 2014-2019 108
Tabel 45 Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan Kabupaten Buleleng Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019 111

Tabel 46 Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Penduduk Berstatus Kawin di Kabupaten Buleleng Tahun 2014-2019 112
Tabel 47 Jumlah Penerbitan Akta Perceraian di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Berdasarkan Kecamatan..... 114
Tabel 48 Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Perceraian Penduduk Berstatus Kawin di Kabupaten Buleleng Tahun 2014-2019 115
Tabel 49 Jumlah Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Berdasarkan Kecamatan..... 117
Tabel 50 Jumlah Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Buleleng Tahun 2014-2019..... 118
Tabel 51 Jumlah Penerbitan Akta Pengakuan Anak di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 120
Tabel 52 Jumlah dan Persentase kepemilikan Akta Pengakuan Anak di Kabupaten Buleleng tahun 2014-2019..... 121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Kabupaten Buleleng 7

Gambar 2 Luas Wilayah Kabupaten Buleleng Menurut Kecamatan..... 8

Gambar 3 Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Buleleng Menurut Bulan 9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat yang mencakup semua aspek kehidupan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pelaksanaan pembangunan idealnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat baik jasmani dan rohani, yang menyangkut berbagai variabel seperti variabel ekonomi, sosial demografi, politik dan variable kejiwaan. Variabel tersebut juga berkaitan dengan penghasilan dan peluang memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia, keamanan berusaha, politik serta kondisi dalam rumah tangganya. Untuk mencapai hal tersebut maka upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat secara konfrehensif dan berkeseimbangan tetap harus terus dilakukan secara berkesinambungan.

Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan sebagaimana tersebut di atas memerlukan perencanaan yang mengintegrasikan berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek kependudukan. Aspek kependudukan hendaknya menjadi titik perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan, karena tanpa memperhatikan pembangunan kependudukan akan berpengaruh terhadap pembangunan diberbagai sektor lainnya.

Oleh sebab itu Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di berbagai sektor perlu memperhatikan perkembangan penduduk baik menyangkut kuantitas, kualitas maupun persebarannya disuatu wilayah di Indonesia. Dengan kata lain, pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan karakteristik penduduk yang berada pada suatu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahaan Daerah telah menegaskan bahwa dalam perencanaan Pembangunan Daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, baik yang menyangkut masalah kependudukan, Sumber daya Alamnya serta yang tidak kalah pentingnya adalah Sumber Daya Manusianya.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan dengan program (SIAK) dan tersimpan didalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. Oleh sebab itu Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengembangan pendataan dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menegaskan bahwa perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam rangka menciptakan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya tampung dan daya dukung lingkungannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional secara berkelanjutan.

Pasal 49 dan 50 Undang-Undang 52 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa :

1. Pemerintah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan.
2. Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sensus, survei, dan pendataan keluarga.
3. Data dan informasi kependudukan dan keluarga wajib digunakan oleh Pemerintah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.
4. Pemerintah menyelenggarakan dan mengembangkan system informasi kependudukan dan keluarga secara berkelanjutan serta wajib mendukung terkumpulnya data dan informasi yang diperlukan.
5. Pemerintah daerah wajib melaporkan data dan informasi kependudukan dan keluarga kepada Pemerintah pusat.
6. Pemerintah wajib menyebarluaskan informasi yang terkumpul pada tingkat nasional untuk keperluan perbandingan pengelolaan kependudukan antar daerah satu dengan yang lainnya di indonesia.

Dari penjabaran diatas terlihat bahwa penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan nasional. Sejalan hal tersebut maka data kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan baik bagi pemerintah maupun pihak swasta dan masyarakat. Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi kependudukan dengan kewenangan antara lain mengelola dan menyajikan data kependudukan sesuai tingkatannya. Dengan demikian database tersebut perlu dikelola

dan disajikan untuk dapat memberikan informasi kependudukan kepada masyarakat, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berbasis kependudukan.

Melalui Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK), daerah dapat menyediakan data penduduk. Selanjutnya data kualitas dan kuantitas penduduk tersebut dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk berbagi kepentingan, misalnya penyusunan profil, perumusan kebijakan, analisa kebijakan dan perencanaan dibidang kependudukan.

Pemerintah Kabupaten Buleleng sejak tahun 2009 sudah menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan telah menghasilkan database kependudukan.

Database setelah diurai dan diolah berdasarkan karakteristik demografi, social penduduk dan Kepala Keluarga dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi dan karakteristik penduduk Kabupaten Buleleng sehingga sangat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mengetahui karakteristik penduduk Kabupaten dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Sebagaimana diketahui bahwa selama ini Pemerintah Daerah menggunakan data.

Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Buleleng ini menggunakan database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kurun waktu 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019. Database yang berisi data penduduk agregat dengan berbagai elemen informasi kependudukan yang telah diolah, ditabulasi dan dianalisa dari aspek kuantitas dan kualitas penduduk. Hal tersebut dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki data yang lebih valid, terinci, dan dapat dipercaya baik kalangan cendikiawan maupun masyarakat umum. Di samping itu untuk lebih

sempurnanya profil perkembangan kependudukan ini, kami juga didukung atas kerjasama yang baik dari berbagai Dinas Instansi terkait lainnya di Kabupaten Buleleng.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan profil perkembangan kependudukan ini adalah untuk memberikan informasi tentang data-data kependudukan dan perkembangannya yang nantinya dapat bermanfaat untuk bahan perumusan kebijakan, perencanaan, penentuan target, sasaran dan program pembangunan lainnya di Kabupaten Buleleng.

1.3. Ruang Lingkup

Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Buleleng ini disusun dengan ruang lingkup meliputi kuantitas, kualitas, serta mobilitas penduduk dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil penduduk kabupaten Buleleng berdasarkan database yang ada pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kurun waktu tanggal 1 Januari 2019 hingga tanggal 31 Desember 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, yang dipertegas kembali dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 474/8458/MD. Tanggal 20 Desember 2012 tentang penyusunan profil perkembangan kependudukan.

1.4. Pengertian Umum Terhadap Istilah Yang Digunakan Dalam Profil Perkembangan Kependudukan.

Dalam profil perkembangan kependudukan ini digunakan beberapa istilah, untuk memudahkan pemahaman, berikut disampaikan pengertian umum terhadap istilah yang digunakan dalam profil perkembangan kependudukan seperti berikut ini :

1) Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat Tinggal di Wilayah Kabupaten Buleleng.
2) Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kuantitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, social, budaya, agama serta lingkungan penduduk kabupaten Buleleng.
3) Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Buleleng yang berkelanjutan.
4) Data Kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang berstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
5) Angkatan Kerja adalah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan (menganggur) atau terlibat dan berusaha terlibat dalam kegiatan produktif.
6) Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN POTENSI DAERAH

KABUPATEN BULELENG

2.1 Letak Geografis, Tofografis dan Iklim

Secara geografis Kabupaten Buleleng terletak di belahan utara Pulau Bali dengan posisi koordinat berada pada 8^0 03'40"sampai 8^0 23'00" Lintang Selatan dan 114^0 25' 55" sampai 115^0 27' 28" Bujur Timur . Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Buleleng adalah sebelah Utara dengan Selat Bali dan laut Jawa, sebelah Timur dengan Kabupaten Karangasem, sebelah Selatan dengan Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Bangli, dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Jembrana

Gambar 1 : Peta Wilayah Kabupaten Buleleng

Kabupaten Buleleng memiliki pantai di bagian utara yang panjangnya 157,05 km. Semua kecamatan kecuali kecamatan Busungbiu dan Sukasada tidak memiliki pantai. Kecamatan Gerokgak memiliki pantai terpanjang diantara kecamatan-kecamatan lain, panjang pantainya mencapai 76,89 km.

Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Buleleng adalah 1.365,88 hektar atau 24,25% dari luas Provinsi Bali. Kec. Gerokgak merupakan kecamatan terluas, yakni 26,11% dari luas kabupaten, sedangkan kecamatan yang memiliki luas paling kecil adalah Kec. Buleleng, yaitu 3,44% .

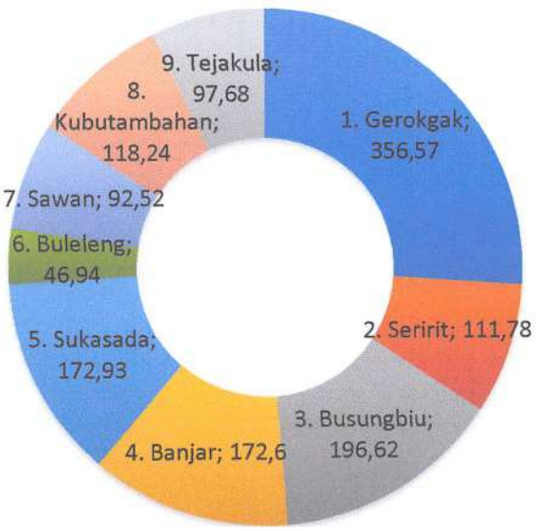

Gambar 2. Luas Wilayah Kabupaten Buleleng Menurut Kecamatan

Sebagian besar wilayah kabupaten Buleleng merupakan daerah berbukit yang membentang di bagian selatan, sedangkan di bagian utara yakni sepanjang pantai merupakan dataran rendah. Diantara perbukitan tersebut terdapat beberapa gunung yang sudah tidak aktif. Gunung yang tertinggi adalah Gunung Tapak (1903 meter) berada di Kecamatan Sukasada, sementara yang paling rendah adalah Gunung Jae (222 m) berada

di wilayah Kecamatan Gerokgak (Tabel 1.1.8). Selain itu Kabupaten Buleleng juga mempunyai banyak sungai besar & kecil, sebagian diantaranya merupakan sungai tadah hujan. Dua buah danau juga berada di daerah ini, yaitu Danau Tamblingan (110 Hektar) berada diwilayah Kecamatan Banjar dan Danau Buyan (360 Hektar) terletak di Kecamatan Sukasada.

Seperti halnya di tempat lain di Indonesia, Kabupaten Buleleng hanya mengenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni - September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember - Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April - Mei dan Oktober - November. Curah hujan setahun di Kabupaten Buleleng bervariasi tiap bulan. Data curah hujan tahun 2017 tertinggi berada pada bulan November, dan terendah pada bulan September.

Gambar 3. Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan Di Kab. Buleleng Menurut Bulan

2.2 Wilayah Administrasi

Kabupaten Buleleng dengan luas wilayah 1.365,88 Hektar terbagi dalam wilayah-administrasi Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Banjar, Lingkungan dan Desa Pakraman dengan rincian sebagaimana tertuang dalam tabel 1.

Tabel 1 : Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Buleleng, Tahun 2019

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun/ Banjar	Lingkungan	Desa Pakraman
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Gerokgak	14	0	75	0	13
2	Seririt	20	1	80	5	25
3	Busungbiu	15	0	41	0	16
4	Banjar	17	0	71	0	17
5	Sukasada	14	1	63	5	20
6	Buleleng	12	17	41	53	21
7	Sawan	14	0	69	0	17
8	Kubutambahan	13	0	46	0	22
9	Tejakula	10	0	60	0	15
Kab.Buleleng		**129**	**19**	**546**	**63**	**166**

Sumber : Buleleng Dalam Angka, 2019.

Berdasarkan data pada tabel 1 diperoleh informasi bahwa di kabupaten Buleleng secara administrasi ada 9 kecamatan, 129 desa, 19 kelurahan, 546 banjar, 63 lingkungan dan 166 desa pakraman.

2.3 Kondisi Demografis

Penduduk sebagaimana pada sebuah wilayah pemerintahan merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang paling vital. Penduduk Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 tercatat sebanyak 823.395 orang yang terdiri dari 414.607 orang penduduk laki dan 408.788 orang penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,00%.

Dari segi persebaran penduduk, penduduk kabupaten Buleleng terbanyak yaitu 18,86% berada di wilayah Kecamatan Buleleng, dan kecamatan Busungbiu 6,83% merupakan daerah yang paling sedikit penduduknya. Dominannya penduduk berada di Kecamatan Buleleng disebabkan karena Kecamatan Buleleng merupakan pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan, sosial, budaya dan lain-lainnya. Kondisi tersebut juga menyebabkan wilayah Kecamatan Buleleng menjadi daerah yang terpadat penduduknya yaitu sebanyak 3.293,18 jiwa/km^2. Sementara itu tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu sebanyak 276,65 jiwa/km^2 juga berada di wilayah Kecamatan Gerokgak.

Jumlah tenaga kerja yang besar akan menimbulkan masalah apabila tidak mampu dikelola dengan baik. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya tingkat pengangguran terbuka. Tingginya angka pengangguran akibat tidak tertampungnya mereka ke dalam sektor-sektor usaha kadang-kadang menimbulkan masalah sosial yang mengarah pada tindakan bersifat negatif.

Berdasarkan data hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk selama tahun 2019, jumlah tenaga kerja di Kabupaten Buleleng tercatat sebanyak 560.015 orang. Dari jumlah tersebut yang merupakan angkatan kerja sebanyak 349.435 orang dan yang bukan

angkatan kerja sebanyak 210.580 orang. Jumlah angkatan kerja yang bekerja mencapai 382.498 orang dan sebanyak 33.063 orang atau 6,64% tidak bekerja atau menganggur.

2.4 Gambaran Ekonomi Daerah.

Kabupaten Buleleng dengan topografis wilayah nyegara gunung memiliki potensi ekonomi berupa potensi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, industry, pariwisata budaya, alam dan spiritual serta aneka jasa tersier lainnya yang diharapkan dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi.

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto. PDRB dibedakan menjadi dua yaitu PDRB sektoral yang merupakan nilai tambah yang tercipta dalam setiap sektor usaha di suatu wilayah pada periode waktu tertentu dan PDRB penggunaan atau konsumsi yang merupakan pengeluaran akhir berbagai produk barang dan jasa untuk konsumsi akhir, investasi fisik dan ekspor neto di suatu wilayah pada periode waktu tertentu.

PDRB Kabupaten Buleleng atas dasar harga berlaku tahun 2019 besarnya 35.509.341,58 rupiah dan 23.437.492,47 rupiah atas dasar harga konstan. Secara nominal nilai PDRB tahun 2019 baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Dari tahun ke tahun lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan masih merupakan sektor paling dominan dalam kontribusinya terhadap pembentukan PDRB di Kabupaten Buleleng tahun ini. Kontribusi sektor ini mencapai 21,35 persen. Lapang usaha perdagangan, hotel dan restoran menjadi sektor yang kontribusinya tertinggi

mencapai 30,43 persen. Kegiatan pariwisata mempunyai peranan penting dalam perkembangan sektor ini.

Sektor yang mempunyai kontribusi paling kecil terhadap pembentukan PDRB di Kabupaten Buleleng adalah pengadaan listrik dan gas yaitu hanya 0,17 persen, tercatat laju pertumbuhan PDRB tahun 2019 di Kabupaten Buleleng adalah sebesar 5,55 persen. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB tahun sebelumnya yang mencapai 6,11 persen.

BAB III

SUMBER DAN JENIS DATA

3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan Kabupaten Buleleng Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

1) Data registrasi :
2) Data non registrasi yaitu data dari BPS Kabupaten Buleleng
    a) Data yang dihasilkan dari pencatatan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) mulai akhir Januari 2019 sampai dengan akhir bulan Desember 2019 pukul 17.00 (Sesuai dengan pasal 12 Permendagri Nomor 65 Tahun 2010).
    b) Data registrasi hasil Sidak Penduduk Pendatang Tinggal Sementara oleh Tim Sidak Gabungan dan hasil Pendataan oleh Tenaga Pengawas Penduduk Pendatang dari bulan Januari s/d Desember 2019.
3) Data dari lintas sector, yaitu data yang bersumber dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng.

3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan Kabupaten Buleleng Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

1) Data Primer

Dalam profil ini adalah data yang diperoleh dari hasil pelaksanaan registrasi langsung pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng selama tahun 2019 melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan data hasil Sidak Penduduk Pendatang Tinggal Sementara oleh Tim Sidak Gabungan dan hasil Pendataan oleh Tenaga Pengawas Penduduk Pendatang dari bulan Januari s/d Desember 2019.

Jenis data yang dihasilkan dari database SIAK antara lain :

a) Jumlah penduduk kabupaten Buleleng dan kecamatan;
b) Jumlah penduduk kabupaten Buleleng dan kecamatan menurut jenis kelamin;
c) Jumlah penduduk kabupaten Buleleng dan kecamatan menurut status kawin;
d) Jumlah penduduk kabupaten Buleleng dan kecamatan menurut pendidikan;
e) Jumlah penduduk kabupaten Buleleng dan kecamatan menurut agama;
f) Jumlah penduduk kabupaten Buleleng dan kecamatan menurut kecacatan;
g) Jumlah penduduk kabupaten Buleleng dan kecamatan menurut pekerjaan;

h) Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Buleleng dan kecamatan menurut jenis kelamin;

i) Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Buleleng dan kecamatan menurut status kawin;

j) Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Buleleng dan kecamatan menurut pendidikan;

k) Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Buleleng dan kecamatan menurut umur;

l) Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Buleleng dan kecamatan menurut status bekerja;

m) Jumlah penduduk masuk dan keluar Kabupaten Buleleng.

Jenis data yang dihasilkan dari Sidak Penduduk Pendatang Tinggal Sementara oleh Tim Sidak Gabungan dan hasil Pendataan oleh Tenaga Pengawas Penduduk Pendatang dari bulan Januari s/d Desember 2019 antara lain :

a) Jumlah penduduk pendatang;

b) Jumlah dan jenis pelanggaran administrasi kependudukan penduduk pendatang.

2) Data Sekunder.

Data sekunder dalam profil ini adalah data yang diperoleh dari instansi lintas sektoral seperti BPS Kab. Buleleng, data dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng, data dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng dan data yang diperoleh dari hasil pengolahan database SIAK Disdukcapil Kabupaten Buleleng.

Jenis data yang digunakan antara lain :

a) Jumlah kelahiran hidup kabupaten Buleleng dirinci per kecamatan;
b) Jumlah kematian bayi kabupaten Buleleng dirinci per kecamatan;
c) Rasio anak dan perempuan;
d) Angka Kematian Anak Balita;
e) Angka Kematian Ibu;
f) Angka Melek Huruf (AMH);
g) Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan;
h) Angka Partisipasi Murni (APM) pedidikan;
i) Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten dirinci per kecamatan;
j) Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten menurut jenis kelamin;
k) Jumlah Angkatan Kerja;
l) Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK);
m) Jumlah penduduk menurut pekerjaan;
n) Jumlah pengangguran terbuka;
o) Migrasi Netto;

p) Jumlah dan proporsi kepemilikan Kartu Keluarga (KK);

q) Jumlah dan proporsi kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

r) Jumlah dan proporsi kepemilikan Akta Kelahiran;

s) Jumlah dan proporsi kepemilikan Akta Kematian;

t) Jumlah dan proporsi kepemilikan Akta Perkawinan;

u) Jumlah dan proporsi kepemilikan Akta Perceraian;

v) Laju Pertumbuhan Penduduk;

w) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS);

x) Data potensi daerah.

BAB IV

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

4.1 Kuantitas Penduduk

Informasi tentang jumlah penduduk sangat penting diketahui terutama untuk mengetahui banyaknya orang yang tinggal disuatu wilayah pada waktu tertentu. Jumlah penduduk disuatu wilayah dipengaruhi oleh banyaknya bayi yang lahir (menambah penduduk), disisi lain dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua kelompok umur. Di samping itu jumlah penduduk dipengaruhi oleh migrasi penduduk. Imigrasi (pendatang) akan menambah jumlah penduduk, emigrasi akan mengurangi jumlah penduduk. Jadi jumlah penduduk akan dipengaruhi oleh tiga komponen demografi, yaitu Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi penduduk. Selisih antara fertilitas dan mortalitas disebut dengan perubahan reproduktif (reproductive change) atau pertumbuhan alamiah (Natural Growth), sedangkan selisih antara migrasi masuk dengan migrasi keluar disebut dengan Migrasi Netto (Net Migration).

4.1.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk.

Pada tahun 2019 Kabupaten Buleleng mempunyai jumlah penduduk sebanyak 823.395 jiwa yang terdiri dari 414.607 penduduk laki-laki dan 408.788 penduduk perempuan. Penduduk tersebut menyebar di 9 (Sembilan) wilayah Kecamatan. Jumlah dan distribusi penduduk Kabupaten Buleleng berdasarkan kecamatan dapat diketahui pada tabel 2 berikut :

Tabel 2. Jumlah dan Proporsi Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2019 menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin.

Kecamatan	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	%
	Jumlah	%	Jumlah	%		
1	2	3	4	5	6	7
Gerokgak	50.074	50,31	49.449	49,69	99.523	12,09
Seririt	48.761	49,92	48.914	50,08	97.675	11,86
Busungbiu	27.782	50,11	27.659	49,89	55.441	6,73
Banjar	45.111	50,30	44.569	49,70	89.680	10,89
Sukasada	45.693	50,23	45.276	49,77	90.969	11,05
Buleleng	77.612	50,37	76.458	49,63	154.070	18,71
Sawan	42.905	50,39	42.246	49,61	85.151	10,34
Kubutambahan	36.716	50,65	35.775	49,35	72.491	8,80
Tejakula	39.953	50,96	38.442	49,04	78.395	9,52
Jumlah	**414.607**	**453,25**	**408.788**	**446,75**	**823.395**	**100,00**

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng, Desember 2019, Diolah.

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa wilayah Kecamatan Buleleng mempunyai jumlah penduduk paling banyak yaitu 154.070 orang atau 18,71% dari jumlah penduduk Kabupaten Buleleng. Hal ini disebabkan karena wilayah Kecamatan Buleleng adalah wilayah pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan, sosial, budaya dan lain-lainnya sehingga pembangunan perkantoran, perumahan, perdagangan, transportasi dan demikian juga penduduk Kabupaten Buleleng terutama penduduk pendatangnya lebih memilih berdomisili di wilayah Kecamatan Buleleng. Sebaliknya Kecamatan Busungbiu memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebanyak 55.441

jiwa atau 6,73% dari jumlah penduduk keseluruhan. Hal ini disebabkan karena wilayah Kecamatan Busungbiu merupakan daerah perbukitan.

4.1.2 Kepadatan Penduduk (Population Density Ratio)

Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ketahun diakibatkan oleh perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah baik karena perubahan alami maupun karena perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk mengetahui kerapatan jumlah penduduk dalam satu kesatuan ruang.

Angka kepadatan penduduk mencerminkan banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tertentu. Rasio Kepadatan Penduduk (Population Density Ratio) dihitung dengan menggunakan rumus: $D = \frac{P}{A}$

Dimana :

D : Rasio Kepadatan Penduduk,

P: Jumlah penduduk (jiwa),

A : Luas Wilayah (km^2).

Tabel 3. Kepadatan Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2019

Kecamatan	Jumlah Penduduk 2019	Luas Wilayah Km²	Kepadatan Penduduk
1	2	3	4
Gerokgak	99.523	356,57	279,11
Seririt	97.675	111,78	873,81
Busungbiu	55.441	196,62	281,97
Banjar	89.680	172,6	519,58
Sukasada	90.969	172,93	526,05
Buleleng	154.070	46,94	3.282,28
Sawan	85.151	92,52	920,35
Kubutambahan	72.491	118,24	613,08
Tejakula	78.395	97,68	802,57
JUMLAH	**823.395**	**1.365,88**	**8.098,81**

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng, 2019 Diolah.

Berdasarkan data pada tabel 3 diperoleh informasi bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 mencapai 8.098,81 orang/km^2. Ini berarti bahwa dalam setiap kilometer persegi wilayah di Kabupaten Buleleng dihuni dengan penduduk kurang lebih sebanyak 8.098 orang. Jika dilihat berdasarkan kecamatan, ternyata Buleleng memiliki rasio kepadatan penduduk yang paling tinggi yaitu sebesar 3.282,28 orang/km^2, Kecamatan Sawan dengan kepadatan sebesar 920,35 orang/km^2, Kecamatan Seririt sebesar 873,81 orang/km^2, Kecamatan Tejakula sebesar 802,57 orang/km^2,

Kecamatan Kubutambahan sebesar 613,08 orang/km^2, Kecamatan Sukasada sebesar 526,04 orang/km^2, Kecamatan Banjar sebesar 519,58 orang/km^2, Kecamatan Busungbiu sebesar 281,97 orang/km^2, dan Kecamatan Gerokgak dengan kepadatan penduduk sebesar 279,11 orang/km^2.

4.1.3 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran prosentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan proyeksi jumlah penduduk di masa depan. Angka pertumbuhan penduduk dihitung dengan rumus :

$$Pt = Po.e^{rt}$$

Dimana :

Pt : jumlah penduduk pada tahun t

Po : jumlah penduduk pada tahun dasar / awal (o)

r : Angka pertumbuhan penduduk

t : Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t

e : Fungsi eksponensial = 2,7182818

Tabel 4. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2019

No	KECAMATAN	Pertumbuhan Penduduk Per Tahun		
		2016-2017	2017-2018	2018-2019
	1	2	3	4
1	Gerokgak	0,845	1,003	0,01
2	Seririt	0,476	0,974	0,00
3	Busungbiu	0,198	0,982	(0,01)
4	Banjar	0,606	0,989	0,01
5	Sukasada	0,865	0,982	0,02
6	Buleleng	0,86	0,998	(0,00)
7	Sawan	0,401	1,02	0,01
8	Kubutambahan	0,456	0,994	0,01
9	Tejakula	0,111	1,023	0,00
Kabupaten Buleleng		**0,607**	**0,996**	**0,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng dari Hasil Registrasi Penduduk, Diolah 2019.

Berdasarkan data pada tabel 4 angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Buleleng dari tahun 2017 hingga tahun 2018 mengalami kenaikan dan dari tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2016-2017 pertumbuhannya mencapai 0,607% tahun 2017 - 2018 naik menjadi 0,996 dan pada tahun 2018 - 2019 terus mengalami penurunan hingga pertumbuhan penduduknya hanya sebesar 0,00.

Jika diamati per kecamatan, pertumbuhan penduduk tertinggi tahun 2016-2017 terjadi di kecamatan Sukasada yang mencapai angka 0,954 disusul kecamatan Gerokgak Banjar dan Seririt. Tingginya Pertumbuhan penduduk di kecamatan Sukasada dapat dijadikan petunjuk bahwa kegiatan ekonomi, pemerintahan dan sektor jasa-jasa lainnya

di wilayah tersebut sedang menggeliat, sehingga menjadi daya tarik penduduk untuk berdomisili. Sementara itu penyebab lain pertumbuhan penduduk yang tinggi di kecamatan Gerokgak dan Banjar perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

4.1.4 Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

Karakteristik penduduk sangat berpengaruh terhadap proses demografi dan tingkah laku social ekonomi. Karakteristik penduduk yang paling penting adalah umur dan jenis kelamin. Distribusi penduduk menurut umur dikelompokkan menurut umur satu tahunan atau umur tunggal (single age) dan lima tahunan, namun dapat juga dikelompokkan menurut distribusi umur tertentu sesuai dengan kebutuhan seperti pengelompokkan penduduk menurut usia sekolah (SD = 7 s/12 tahun; SLTP = 13 - 15 tahunan; SLTA = 16 - 18 tahunan; dan perguruan tinggi = 19 - 24 tahunan).

Selain pengelompokkan berdasarkan distribusi umur penduduk, terdapat juga pengelompokan penduduk berdasarkan struktur umur penduduk yang dikelompokan menjadi 3 kelompok besar yaitu :

- Penduduk usia muda yaitu penduduk usia dibawah usia 15 tahun atau kelompok umur 0 - 14 tahun.
- Penduduk usia produktif yaitu penduduk umur 15 - 59 tahun
- Penduduk usia lanjut yaitu penduduk umur 60 tahun ke atas (mengikuti ketetapan WHO)

Struktur penduduk menurut umur dapat digunakan untuk mengetahui apakah penduduk di suatu wilayah tersebut kelompok umur muda atau tua. Penduduk suatu wilayah dianggap penduduk muda apabila jumlah penduduk yang berumur dibawah 15 tahun mencapai sebesar 40% atau lebih. Suatu daerah yang mempunyai karakteristik penduduk muda membutuhkan investasi sosial ekonomi yang berbeda dengan investasi untuk kelompok umur tua. Kelompok umur muda membutuhkan fasilitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya, sementara kelompok umur tua tidak membutuhkan fasilitas pendidikan, tetapi fasilitas untuk ketenagakerjaan, kesehatan, kebutuhan social dan lain sebagainya. Indikator yang menunjukkan komposisi penduduk menurut karakteristik demografi adalah :

- Umur Median (Median Age)
- Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)
- Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan (Depedency Ratio).

4.1.4.1 Umur Median (Median Age)

Umur Median adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian pertama yang lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median. Kegunaan dari umur median adalah untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu. Berdasarkan umur median ini penduduk disuatu daerah dikatagorikan :

- Penduduk muda, jika umur median kurang dari 20 tahun;
- Penduduk intermediate, jika umur median antara 20 - 30 tahun;
- Penduduk tua, jika umur median lebih dari 30 tahun.

Untuk menghitung umur median adalah dengan menggunakan rumus :

$$\text{Umur Median (Md)} = I_{Md} + \left[\frac{\frac{N}{2} - fx}{\int_{Md}}\right] xi$$

Dimana :

N = Jumlah penduduk total

I_{Md} = Batas bawah kelompok umur yang mengandung N/2

fx = Jumlah penduduk kumulatif sampai dengan kelompok umur yang Mengandung N/2

$\int_{Md}$ = Jumlah penduduk pada kelompok umur dimana terdapat nilai N/2

I = Kelas interval umur (5 tahun).

Tabel 5. Jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng Berdasarkan Kelompok Umur Lima Tahunan Tahun 2019

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	Kumulatif Fx	% Kumulatif
1	2	3	4
0-4 Tahun	52.559	52.559	0,06
5-9 Tahun	71.029	123.588	0,15
10-14 Tahun	70.058	193.646	0,24
15-19 Tahun	71.928	265.574	0,32
20-24 Tahun	66.044	331.618	0,40
25-29 Tahun	61.539	393.157	0,48
30-34 Tahun	59.813	452.970	0,55
35-39 Tahun	65.244	518.214	0,63
40-44 Tahun	60.661	578.875	0,70
45-49 Tahun	55.724	634.599	0,77
50-54 Tahun	51.124	685.723	0,83
55-59 Tahun	39.823	725.546	0,88
60-64 Tahun	32.495	758.041	0,92
65-69 Tahun	24.594	782.635	0,95
70-74 Tahun	16.730	799.365	0,97
>75 Tahun	24.030	823.395	1,00
Total	**823.395**		**9,86**

Database Disdukcapil Kab. Buleleng, Tahun 2019, diolah.

Dengan menggunakan data pada table 5 dan dilakukan analisa/perhitungan sesuai rumus tersebut di atas didapatkan umur median (Md) penduduk Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 adalah sebesar 31,05 (dibulatkan menjadi 31 tahun). Angka tersebut berarti bahwa selama tahun 2019 setengah dari penduduk di kabupaten Buleleng berusia dibawah umur 31 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 31 tahun. Umur Median tersebut terletak diantara 30 - 40 tahun, sehingga penduduk di Kabupaten Buleleng dikatagorikan sebagai **penduduk tua**. Hal tersebut tentunya menarik untuk dikaji apalagi jika kita amati dalam keseharian terlihat bahwa penduduk muda seakan dominan di Kota Singaraja. Dugaan sementara hal tersebut disebabkan karena Kota Singaraja memang merupakan kota pendidikan dengan murid/siswa/mahasiswa yang berasal dari berbagai kabupaten di Bali, tetapi mereka-mereka tersebut KTP atau pendaftaran penduduknya tetap di daerah asalnya sehingga mereka hanya merupakan penduduk pendatang tinggal sementara. Dilain pihak tidak bisa dipungkiri bahwa banyak dari penduduk produktif Kabupaten Buleleng pergi merantau bersama istri dan anaknya dan menetap ke wilayah Bali Selatan sehingga yang tertinggal di Kabupaten Buleleng adalah penduduk yang tergolong sudah tua.

4.1.4.2 Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Rasio jenis kelamin adalah suatu angka yang menunjukan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Informasi tentang rasio jenis kelamin dapat disajikan menurut kelompok umur maupun wilayah dalam bentuk tabel maupun grafik. Informasi ini dapat berguna untuk perencanaan penbangunan berwawasan gender.

Rasio jenis kelamin dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$RJK = \left(\frac{\sum L}{\sum P}\right) x\ K$$

Dimana :

RJK = Rasio Jenis Kelamin

$\sum L$ = Jumlah penduduk Laki-laki

$\sum P$ = Jumlah penduduk Perempuan

K = Konstanta = 100 penduduk perempuan.

Tabel 6. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Penduduk Kabupaten Buleleng berdasarkan kelompok umur Desember Tahun 2019

No	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RJK
	1	2	3	4	5
1	0-4 Tahun	27.267	25.292	52.559	107,81
2	05-09 Tahun	36.678	34.351	71.029	106,77
3	10-14 Tahun	36.156	33.902	70.058	106,65
4	15-19 Tahun	36.784	35.144	71.928	104,67
5	20-24 Tahun	33.948	32.096	66.044	105,77
6	25-29 Tahun	31.405	30.134	61.539	104,22
7	30-34 Tahun	30.126	29.687	59.813	101,48
8	35-39 Tahun	33.398	31.846	65.244	104,87
9	40-44 Tahun	30.829	29.832	60.661	103,34
10	45-49 Tahun	28.287	27.437	55.724	103,10
11	50-54 Tahun	24.621	26.503	51.124	92,90
12	55-59 Tahun	19.429	20.394	39.823	95,27
13	60-64 Tahun	15.394	17.101	32.495	90,02
14	65-69 Tahun	11.985	12.609	24.594	95,05
15	70-74 Tahun	7.329	9.401	16.730	77,96
16	>75 Tahun	10.971	13.059	24.030	84,01
JUMLAH		**414.607**	**408.788**	**823.395**	**101,42**

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng, Desember, 2019, Diolah

Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Buleleng tahun 2019 berdasarkan data yang tertuang pada tabel 6 adalah sebesar 101,42 yang berarti bahwa dari setiap 100 orang penduduk perempuan di Kabupaten Buleleng terdapat sebanyak 101 orang penduduk laki-laki. Walaupun secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih kecil dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, namun jika rasio jenis kelamin dilihat berdasarkan kelompok umur 0 - 19 tahun, demikian juga pada kelompok umur 30 - 49 tahun jumlah penduduk laki-lakinya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Dari tabel 6 di atas juga diperoleh informasi bahwa mulai kelompok umur interval 50 - 54 tahun ke atas, jumlah penduduk laki-lakinya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuannya. Dari angka-angka tersebut tentunya merupakan informasi kependudukan yang sangat menarik terutama jika dikaitkan dengan penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Buleleng yang harus memperhatikan kaum gender.

Tabel 7. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Buleleng Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Laki–Laki	%	Perempuan	%	Jumlah	Rjk
1	Gerokgak	50.074	50,31	49.449	49,69	99.523	101,26
2	Seririt	48.761	49,92	48.914	50,08	97.675	99,69
3	Busungbiu	27.782	50,11	27.659	49,89	55.441	100,44
4	Banjar	45.111	50,30	44.569	49,70	89.680	101,22
5	Sukasada	45.693	50,23	45.276	49,77	90.969	100,92
6	Buleleng	77.612	50,37	76.458	49,63	154.070	101,51

7	Sawan	42.905	50,39	42.246	49,61	85.151	101,56
8	Kubutambahan	36.716	50,65	35.775	49,35	72.491	102,63
9	Tejakula	39.953	50,96	38.442	49,04	78.395	103,93
Jumlah		**414.607**	**50,35**	**408.788**	**49,65**	**823.395**	**101,42**

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng, 2019, Diolah

Data rasio jenis kelamin juga disajikan berdasarkan kecamatan. Berdasarkan data pada table 7 rasio jenis kelamin per-kecamatan di Kabupaten Buleleng, Kecamatan Seririt angka sex rationya lebih kecil dari 100. Mengingat rasio jenis kelamin penduduk pada Kecamatan Seririt angkanya berada di bawah angka 100 dan kecenderungan tersebut mulai tampak pada struktur umur 50 tahun ke atas. Maka penyusunan kebijakan pembangunan yang berwawasan gender untuk hampir semua kecamatan di Kabupaten Buleleng menjadi sangat penting. Hal ini capai sasaran yang optimal.

4.1.4.3 Rasio Ketergantungan (Dependency ratio)

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (**Dependency ratio)** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 - 64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif. Semakin tinggi persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio Ketergantungan dapat dibedakan menjadi Rasio Ketergantungan Muda (RK_{muda}), Rasio Ketergantungan **Tua** (RK_{tua}) dan Rasio Ketergantungan Total (RK_{total}) dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$RK_{muda} = \frac{P_{0-14}}{P_{15-64}}$$

$$RK_{tua} = \frac{P_{65+}}{P_{15-64}}$$

$$RK_{total} = \frac{(P_{0-14}) + (P_{65+})}{P_{15-64}}$$

RK_{muda}= Rasio Ketergantungan Penduduk usia muda
RK_{tua} = Rasio Ketergantungan Penduduk usia tua
RK_{total} = Rasio Ketergantungan Penduduk usia muda dan tua
P_{0-14} = Jumlah penduduk usia muda (0 - 14 tahun)
$P_{(65)+}$ = Jumlah penduduk usia tua (65 thn ke atas)
$P_{(15-64)}$ = Jumlah penduduk usia produktif (15 thn - 64 th)

Guna mengetahui rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Buleleng di tiap-tiap kecamatan dan berdasarkan jenis kelamin, dibutuhkan data jumlah penduduk kelompok umur 0 - 14 tahun, kelompok umur 15 - 64 tahun dan kelompok umur 65 tahun ke atas per kecamatan dan berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 8. Penduduk Kabupaten Buleleng tahun 2019 berdasarkan kelompok Umur Muda, Produktif dan dirinci menurut Kecamatan.

No	Kecamatan	Kelompok Umur			Jumlah Penduduk
		0-14 Tahun	15-64 Tahun	>=65 Tahun	
	1	2	3	4	5
1	GEROKGAK	24.773	68.371	6.379	99.523
2	SERIRIT	21.752	67.281	8.642	97.675
3	BUSUNGBIU	11.719	37.819	5.903	55.441
4	BANJAR	19.521	62.068	8.091	89.680
5	SUKASADA	22.587	61.808	6.574	90.969
6	BULELENG	36.432	106.522	11.116	154.070

7	SAWAN	20.524	57.580	7.047	85.151
8	KUBUTAMBAHAN	17.498	49.738	5.255	72.491
9	TEJAKULA	18.840	53.208	6.347	78.395
JUMLAH		**193.646**	**564.395**	**65.354**	**823.395**

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng, 2019, Diolah

Tabel 9. Penduduk Kelompok Umur Muda, Produkif dan Tua Kabupaten Buleleng menurut Jenis Kelamin Tahun 2019.

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk Kelompok Umur			Muda+Tua
	Muda	Produktif	Tua	
1	2	3	4	5
Laki-laki	100.101	284.221	30.285	130.386
Perempuan	93.545	280.174	35.069	128.614
L + P	**193.646**	**564.395**	**65.354**	**259.000**

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng, 2019, Diolah

Berdasarkan data yang tertuang dalam tabel 8 dan table 9 di atas dengan menggunakan rumus :

$$RK_{muda} = \frac{P_{0-14}}{P_{15-64}} \text{ kemudian } RK_{tua} = \frac{P_{65+}}{P_{15-64}} \text{ dan } RK_{total} = \frac{(P_{0-14}) + (P_{65+})}{P_{15-64}}$$

Selanjutnya dapat diketahui rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Buleleng sebagaimana tertuang dalam angka-angka yang tersaji pada table 10 dan 11 berikut ini :

Tabel 10. Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Buleleng Dirinci Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019.

No	Kecamatan	Kelompok Umur						Jumlah	Jumlah Penduduk	%
		Muda			Tua					
		Laki	Perempuan	Jumlah	Laki	Perempuan	Jumlah			
1	Gerokgak	12.729	12.044	24.773	2.990	3.389	6.379	31.152	99.523	12,03
2	Seririt	11.186	10.566	21.752	3.848	4.794	8.642	30.394	97.675	11,74
3	Busungbiu	6.049	5.670	11.719	2.733	3.170	5.903	17.622	55.441	6,80
4	Banjar	10.184	9.337	19.521	3.704	4.387	8.091	27.612	89.680	10,66
5	Sukasada	11.693	10.894	22.587	3.100	3.474	6.574	29.161	90.969	11,26
6	Buleleng	18.920	17.512	36.432	5.143	5.973	11.116	47.548	154.070	18,36
7	Sawan	10.684	9.840	20.524	3.247	3.800	7.047	27.571	85.151	10,65
8	Kubutambahan	8.901	8.597	17.498	2.513	2.742	5.255	22.753	72.491	8,78
9	Tejakula	9.755	9.085	18.840	3.007	3.340	6.347	25.187	78.395	9,72
Jumlah		**100.101**	**93.545**	**193.646**	**30.285**	**35.069**	**65.354**	**259.000**	**823.395**	**100,00**

Sumber : Data base Dukcapil Kab. Buleleng, 2019, Diolah

Tabel 11. Rasio Ketergantungan Penduduk Muda, Tua dan Total Kabupaten Buleleng Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

Jenis Kelamin	Rasio Ketergantungan		
	Muda	Tua	Total
1	2	3	4
Laki-laki	100.101	30.285	130.386
Perempuan	93.545	35.069	128.614
L+P	**193.646**	**65.354**	**259.000**

Sumber : Data base Dukcapil Kab. Buleleng, Desember 2019, Diolah

Dari table 10 dan table 11 diketahui bahwa angka rasio ketergantungan penduduk kabupaten Buleleng tahun 2019 adalah sebesar 259.000. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 orang produktif mempunyai beban tanggungan sebanyak 45 - 46 orang. Jumlah tanggungan tersebut bersumber dari penduduk yang belum produktif sebesar 34 - 35 orang dan penduduk yang dianggap sudah tidak produktif lagi sebanyak 11 - 12 orang.

Rasio ketergantungan tertinggi di Kabupaten Buleleng terdapat di Kecamatan Buleleng yang hampir mendekati angka 45 yang berarti setiap 100 orang penduduk produktif memiliki beban menanggung 45 orang, sementara rasio ketergantungan terendah ada di Kecamatan Busungbiu.

Jika dilihat dari jenis kelaminnya, rasio ketergantungan penduduk laki-laki di Kabupaten Buleleng lebih tinggi dibandingkan dengan rasio ketergantungan penduduk perempuan. Keadaan sebaliknya terlihat pada rasio ketergantungan tua dimana rasio ketergantungan tua perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk tua jenis kelamin laki-laki.

Dari angka-angka tersebut di atas terlihat bahwa penduduk produktif lebih banyak menanggung biaya hidup penduduk usia muda dengan jenis kelamin laki-laki, sedangkan tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tua dialami oleh penduduk perempuan, sementara penduduk usia produktif laki-laki lebih banyak perannya mengurusi/menanggung penduduk usia belum produktif. Tingginya rasio ketergantungan terhadap penduduk kelompok umur muda di Kabupaten Buleleng disetiap kecamatan dan juga berdasarkan jenis kelamin dapat dijadikan informasi bagi Pemerintah Daerah dalam membuat program dan kegiatan inovatif yang dapat

meringankan beban mereka mengingat pengeluaran penduduk pada usia/kelompok umur 0 - 14 tahun dominan untuk biaya pendidikan, gizi dan kesehatan di satu sisi dan disisi lain yang sangat vital adalah program dengan kegiatan yang dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja.

4.1.5 Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

4.1.5.1 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan pendidikan yang ditamatkan sangat dibutuhkan oleh pemerintah Daerah karena data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan disamping menunjukkan pencapaian pembangunan dengan berbagai karakteristiknya juga merupakan gambaran kualitas SDM di suatu daerah. Umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka kualitas sumberdaya manusianya semakin tinggi.

Tabel 12. Jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2019.

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	
		n (jiwa)	%
1	2	3	4
1	Tidak/Belum Sekolah	238.799	29,00
2	Belum Tamat SD	53.141	6,45
3	Tamat SD/Sederajat	252.323	30,64
4	SLTP/Sederajat	96.922	11,77

5	SLTA/Sederajat	143.294	17,40
6	Diploma I/II	8.218	1,00
7	Akdm/Dip. III/Sarmuda	6.905	0,84
8	Diploma IV/Strata I	22.339	2,71
9	Strata II	1.299	0,16
10	Strata III	155	0,02
JUMLAH		**823.395**	**100**

Sumber : Data base Dukcapil Kab. Buleleng, 2019, Diolah

Data pada tabel 12 memperlihatkan bahwa dari 823.395 jiwa penduduk Kabupaten Buleleng di tahun 2019 sebanyak 6,45% atau sebanyak 53.141 orang yang belum menamatkan pendidikan SD/Sederajat, selanjutnya jumlah penduduk yang tidak/belum sekolah mencapai 29,00% atau sebanyak 238.799 orang. Sementara itu yang berpendidikan SLTP/Sederajat tercatat sebanyak 96.922 orang atau sebesar 11,77%. Yang menamatkan SLTA sederajat sebanyak 143.294 orang atau 17,40% dan yang tamat SD/Sederajat jumlahnya juga cukup tinggi yaitu 252.323 orang atau 30,64%.

Lebih lanjut penduduk yang berpendidikan Diploma I/II sebanyak 8.218 atau 1,00%, yang berpendidikan Akademi/Diploma III/Sarjana Muda sebanyak 6.905 orang atau 0,84%, sebanyak 22.339 orang atau 2,71% berpendidikan Diploma IV/Strata I, yang berpendidikan Strata II berjumlah 1.299 orang atau 0,16% dan yang berpendidikan Strata III berjumlah 155 orang atau 0,02%.

Berdasarkan uraian tersebut didapat informasi bahwa jumlah penduduk Kabupaten Buleleng di tahun 2019 termasuk penduduk yang berpendidikan rendah. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh pada kualitas SDM di Kabupaten Buleleng dan perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah daerah.

Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan karakteristik penduduk yang berada pada wilayah itu sendiri, oleh karena itu akan menjadi penting untuk menampilkan data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan berdasarkan kecamatan.

Tabel 13. Distribusi Persentase Penduduk Kabupaten Buleleng Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2019

TINGKAT PENDIDIKAN	KECAMATAN								
	Gerokgak	Seririt	Busungbiu	Banjar	Sukasada	Buleleng	Sawan	Kubutambahan	Tejakula
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tidak/Belum Sekolah	31.271	28.071	14.418	25.614	26.747	42.785	24.758	21.842	23.293
Belum Tamat SD/Sederajat	5.620	8.215	3.712	5.317	6.192	8.678	6.483	4.030	4.894
Tamat SD/Sederajat	36.455	28.590	16.375	28.764	28.851	34.133	24.329	26.729	28.097
SLTP/Sederajat	11.491	11.586	8.251	12.247	10.292	17.322	9.454	7.806	8.473
SLTA/Sederajat	12.033	17.336	10.611	14.523	14.570	36.493	16.544	9.863	11.321
Diploma I/II	606	938	513	864	988	2.028	901	578	802
Akademi/Diploma III/S.Muda	454	847	396	551	653	2.501	675	389	439
Diploma IV/Strata I	1.533	1.981	1.115	1.731	2.479	9.322	1.932	1.210	1.036
Strata II	50	94	46	65	177	723	69	41	34
Strata III	10	17	4	4	20	85	6	3	6
JUMLAH	**99.523**	**97.675**	**55.441**	**89.680**	**90.969**	**154.070**	**85.151**	**72.491**	**78.395**

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng, 2019, Diolah

Berdasarkan data pada tabel 13 dapat disampaikan analisis data sebagai berikut :

1) Penduduk yang tidak/belum sekolah

Dari 238.799 penduduk yang tidak/belum sekolah di kabupaten Buleleng, jika dilihat berdasarkan kecamatan maka jumlah penduduk yang tidak/belum sekolah paling banyak ada di Kecamatan Buleleng yaitu 42.785, disusul Kecamatan Gerokgak 31.271, Kecamatan Seririt 28.071, Kecamatan Sukasada 26.747, Kecamatan Banjar 25.614, Kecamatan Sawan 24.758, Kecamatan Tejakula 23.293, Kecamatan Kubutambahan 21.842 dan yang terendah Kecamatan Busungbiu 14.418.

2) Penduduk yang belum tamat SD/Sederajat

Dari 53.141 penduduk yang belum tamat SD/Sederajat di Kabupaten Buleleng, jika dilihat berdasarkan kecamatan maka jumlah penduduk yang belum tamat SD/Sederajat paling banyak ada di Kecamatan Buleleng yaitu 8.678, disusul Kecamatan Seririt 8.215, Kecamatan Sawan 6.483, Kecamatan Sukasada 6.192, Kecamatan Gerokgak 5.620, Kecamatan Banjar 5.317, Kecamatan Tejakula 4.894, Kecamatan Kubutambahan 4.030, dan yang terendah Kecamatan Busungbiu 3.712.

3) Penduduk yang berpendidikan tamat SD/Sederajat

Dari 252.323 penduduk yang tamat SD/Sederajat di Kabupaten Buleleng, jika dilihat berdasarkan kecamatan maka jumlah penduduk yang tamat SD/Sederajat paling banyak ada di Kecamatan Gerokgak yaitu 36.455, disusul Kecamatan Buleleng 34.133, Kecamatan Sukasada 28.851, Kecamatan Banjar 28.764, Kecamatan Seririt 28.590,

Kecamatan Tejakula 28.097, Kecamatan Kubutambahan 26.729, Kecamatan Sawan 24.329 dan yang terendah Kecamatan Busungbiu 16.375.

4) Penduduk yang berpendidikan tamat SLTP/Sederajat

Dari 96.922 penduduk yang tamat SLTP/Sederajat di Kabupaten Buleleng, jika dilihat berdasarkan kecamatan maka jumlah penduduk yang tamat SLTP/Sederajat paling banyak ada di Kecamatan Buleleng yaitu 17.322, disusul Kecamatan Banjar 12.247, Kecamatan Seririt 11.586, Kecamatan Gerokgak 11.491, Kecamatan Sukasada 10.292, Kecamatan Sawan 9.454, Kecamatan Tejakula 8.473, Kecamatan Busungbiu 8.251, dan yang terendah di Kecamatan Kubutambahan sebesar 7.806.

5) Penduduk yang berpendidikan tamat SLTA/Sederajat

Dari 143.294 penduduk yang tamat SLTA/Sederajat di Kabupaten Buleleng, jika dilihat berdasarkan kecamatan maka jumlah penduduk yang tamat SLTA/Sederajat paling banyak ada di Kecamatan Buleleng yaitu 36.493 disusul. Kecamatan Seririt 17.336, Kecamatan Sawan 16.544, Kecamatan Sukasada 14.570, Kecamatan Banjar 14.523, Kecamatan Gerokgak 12.033, Kecamatan Tejakula 11.321, Kecamatan Busungbiu 10.611, dan terendah di Kecamatan Kubutambahan sebesar 9.863.

6) Penduduk yang berpendidikan tamat Diploma I/II

Dari 8.218 penduduk yang tamat Diploma I/II di Kabupaten Buleleng, jika dilihat berdasarkan kecamatan maka jumlah penduduk yang tamat Diploma I/II paling banyak ada di Kecamatan Buleleng yaitu 2.028, disusul Kecamatan Sukasada 988, Kecamatan Seririt 938, Kecamatan Sawan 901, Kecamatan Banjar 864, Kecamatan Tejakula 802, Kecamatan Gerokgak 606, Kecamatan Kubutambahan 578, dan yang terendah di Kecamatan Busungbiu sebesar 513.

7) Penduduk yang berpendidikan Akademi/Diploma III/Sarjana Muda

Dari 6.905 penduduk yang tamat Akademi/Diploma III/Sarjana Muda di Kabupaten Buleleng, jika dilihat berdasarkan kecamatan maka jumlah penduduk yang tamat Akademi/Diploma III/Sarjana Muda paling banyak ada di Kecamatan Buleleng yaitu 2.501, disusul Kecamatan Seririt 847, Kecamatan Sawan 675, Kecamatan Sukasada 653, Kecamatan Banjar 551, Kecamatan Gerokgak 454, Kecamatan Tejakula 439, Kecamatan Busungbiu 396 dan yang terendah Kecamatan Kubutambahan 389.

8) Penduduk yang berpendidikan Strata I/Diploma IV

Dari 22.339 penduduk yang tamat Diploma IV/Strata I di Kabupaten Buleleng, jika dilihat berdasarkan kecamatan maka jumlah penduduk yang tamat Diploma IV/Strata I paling banyak ada di Kecamatan Buleleng yaitu 9.322, disusul Kecamatan Sukasada 2.479, Kecamatan Seririt 1.981, Kecamatan Sawan 1.932, Kecamatan Banjar 1.731, Kecamatan Gerokgak 1.533, Kecamatan Kubutambahan 1.210, Kecamatan Busungbiu 1.112, dan yang terendah di Kecamatan Tejakula sebesar 1.036.

9) Penduduk yang berpendidikan Strata II

Dari 1.299 penduduk yang tamat Strata II di Kabupaten Buleleng, jika dilihat berdasarkan kecamatan maka jumlah penduduk yang tamat Strata II paling banyak ada di Kecamatan Buleleng yaitu 723, disusul oleh Kecamatan Sukasada 177, Kecamatan Seririt 94, Kecamatan Sawan 69, Kecamatan Banjar 65, Kecamatan Gerokgak 50, Kecamatan Busungbiu 46, Kecamatan Kubutambahan 41, dan yang terendah di Kecamatan Tejakula sebesar 34.

10) Penduduk yang berpendidikan Strata III

Dari 155 penduduk yang tamat Strata III di Kabupaten Buleleng, jika dilihat berdasarkan kecamatan maka jumlah penduduk yang tamat Strata III paling banyak ada di Kecamatan Buleleng 85, Kecamatan Sukasada 20, Kecamatan Seririt 17, Kecamatan Gerokgak 10, Kecamatan Tejakula 6, Kecamatan Sawan 6, Kecamatan Banjar 4, Kecamatan Busungbiu 4, dan Kubutambahan 3.

4.1.5.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.

Dengan data jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan agama akan diketahui karakterisitik penduduk berdasarkan pemeluk agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Kong Hu Cu dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa).

Kabupaten Buleleng merupakan daerah terbuka dengan karakteristik penduduk yang heterogen dari segi agama, kebudayaan, adat dan lain-lain sehingga dari segi agama yang dianut oleh masyarakatnya terdapat 6 jenis agama dan aliran kepercayaan. Berikut disajikan data jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut.

Tabel 14. Jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng Berdasarkan Agama Yang Dianut Dirinci Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019.

No	Kecamatan	Agama							
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Buddha	Kong Hu Cu	Kepercayaan	Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gerokgak	27.764	426	76	71.165	84	0	8	99.523
2	Seririt	6.135	360	59	90.954	167	0	0	97.675
3	Busungbiu	263	141	18	54.996	18	1	4	55.441
4	Banjar	2.820	405	64	85.980	411	0	0	89.680
5	Sukasada	12.788	628	188	77.220	141	0	4	90.969
6	Buleleng	22.164	2.756	1.115	124.662	3.275	88	10	154.070
7	Sawan	845	458	44	83.745	59	0	0	85.151
8	Kubutambahan	811	170	53	71.370	87	0	0	72.491
9	Tejakula	1.534	78	36	76.730	13	0	4	78.395
Jumlah		**75.124**	**5.422**	**1.653**	**736.822**	**4.255**	**89**	**30**	**823.395**
%		**9,12**	**0,66**	**0,20**	**89,49**	**0,52**	**0,01**	**0,00**	

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng, 2019, Diolah

Berdasarkan tabel 14 dapat diketahui bahwa dari 823.395 jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng tahun 2019 sebanyak 736.822 orang atau 89,49% menganut agama Hindu, disusul pemeluk agama Islam sebanyak 75.124 orang atau 9,12%, pemeluk agama Kristen Protestan berjumlah 5.422 orang atau 0,66%, pemeluk agama Buddha berjumlah 4.255 orang atau 0,52%, pemeluk agama Kristen Katolik sebanyak 1.653 orang atau 0,20%, pemeluk agama Kong Hu Cu berjumlah 89 orang atau 0,01% dan Penganut Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa berjumlah 30 orang atau 0,00%.

Dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa agama Hindu merupakan agama mayoritas yang dianut penduduk Kabupaten Buleleng. Walaupun demikian dari segi kerukunan umat beragama di Kabupaten Buleleng, umat Hindunya tidak arogan atau menekan pemeluk agama lain sehingga terwujud kondisi keamanan yang kondusif penuh toleransi. Semua pemeluk agama dapat menjalankan ibadahnya masing-masing. Ini dibuktikan dengan telah berdirinya tempat tempat ibadah seperti Masjid sebanyak 74 buah, Langgar 47 buah, Musholla 117 buah, Wihara 12 buah, Gereja 2 buah. Adanya toleransi antar umat beragama di Kabupaten Buleleng tidak lepas dari pembinaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah melalui Forum Kerukunan Umat Bersama (FKUB) maupun oleh lembaga atau tokoh-tokoh agama itu sendiri.

4.1.5.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng Berdasarkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Buleleng masih diwarnai dengan banyaknya permasalahan sosial yang cukup tinggi diantaranya adalah masalah kemiskinan, masalah kecacatan, masalah keterlantaran, masalah ketunaan sosial dan masalah bencana alam dan sosial.

Data berkaitan dengan penduduk penyandang cacat dan jenis kecacatannya sangat diperlukan dalam penyusunan program pelayanan publik yang ramah terhadap penyandang cacat. Kabupaten Buleleng dengan jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 823.395 jiwa walapun telah banyak melakukan upaya penanggulangan masalah kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial dan masalah bencana alam, namun

sampai saat ini juga belum bisa terlepas dengan permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Tabel 15. Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS) Kabupaten Buleleng Tahun 2019

No	Jenis PMKS	Satuan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
	2	3	4	5	6
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	Anak	98	176	274
2	Anak Terlantar (AT)	Anak	648	973	1.621
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	Anak	17	26	43
4	Anak Jalanan	Anak	19	3	22
5	Anak Dengan Kedissabilitas (ADK)	Anak	536	355	891
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah	Anak	0	3	3
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Anak	1	3	4
8	Lanjut Usia Terlantar	Orang	1.913	4.074	5.987
9	Penyandang Disabilitas	Orang	2.625	1.934	4.559
10	Tuna Susila	Orang	3	27	30
11	Gelandangan	Orang	7	9	16
12	Pengemis	Orang	0	2	2
13	Pemulung	Orang	63	94	157
14	Kelompok Minoritas	Orang	0	3	3
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	Orang	447	68	515
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	Orang	17	0	17
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Orang	7	1	8

18	Korban Trafficking	Orang	0	0	0
19	Korban Tindak Kekerasan	Orang	0	16	16
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Orang	55	0	55
21	Korban Bencana Alam	Orang	113	0	113
22	Korban Bencana Sosial	Orang	1	3	4
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Orang	0	3.911	3.911
24	Fakir Miskin (FM)	KK	0	0	30.114
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	KK	0	73	73
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	KK	0	0	0

Sumber : Dinas Sosial Kab. Buleleng 2019, diolah.

Hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2019 sebagaimana data yang tertera dalam tabel 15 menunjukkan ada 26 jenis permasalahan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS). Dari 26 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial yang jumlahnya cukup banyak antara lain : fakir miskin sebanyak 30.114 KK, lanjut usia terlantar 5.987 orang, penyandang disabilitas 4.559 orang, perempuan rawan sosial ekonomi 3.911 orang, anak terlantar 1.621 orang, dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan 515 orang. Penyandang disabilitas sebanyak 4.414 orang tersebar di seluruh kecamatan di kabupaten Buleleng terdiri dari cacat fisik, cacat netra/buta, cacat rungu/wicara, cacat mental/jiwa, cacat ganda (fisik dan mental) serta cacat lainnya. Secara rinci jumlah penduduk penyandang cacat di kabupaten Buleleng disajikan dalam tabel 16 berikut :

Tabel 16. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kecacatan Kabupaten Buleleng Tahun 2019.

No	Jenis Kecacatan	Jumlah	%
	2	3	4
1	CACAT FISIK	2.739	0,33
2	CACAT NETRA/BUTA	375	0,05
3	CACAT RUNGU/WICARA	341	0,04
4	CACAT MENTAL/JIWA	455	0,06
5	CACAT FISIK DAN MENTAL	510	0,06
6	EKS PENYAKIT KRONIS	139	0,02
Jumlah		**4.559**	**0,55**

Sumber : Dinas Sosial Kab. Buleleng 2019, Diolah

Berdasarkan data yang tertera dalam tabel 16 tersebut di atas dapat diketahui bahwa dari 4.559 jumlah penduduk cacat, sebanyak 2.739 orang atau 0,33% termasuk katagori cacat fisik, 455 orang atau 0,06% cacat mental/jiwa, 510 orang atau 0,06% cacat ganda (cacat fisik dan mental), 341 orang atau 0,04% tuna rungu/wicara, 375 orang atau 0,05% cacat netra/tuna netra dan 139 orang atau 0,02% eks penyakit kronis.

Untuk menunjang kegiatan dalam melaksanakan kegiatan daripada permasalahan sosial tersebut. Di Dinas Sosial mempunyai tenaga relawan yang terdiri dari berbagai Potensi Sumber Kesjahteraan Sosial (PSKS).

Secara terinci Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Buleleng tahun 2019. Di sajikan dalam tabel 17 :

Tabel 17. Data Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Buleleng Tahun 2019

No	Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Satuan	Jenis Kelamin		
			L	P	Jumlah
	2	3	4	5	6
1	Pekerja Sosial Profesional	Orang	7	3	10
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	271	101	372
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Orang	82	4	86
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Lembaga	-	-	48
5	Karang Taruna (KT)	KT	-	-	148
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Lembaga	-	-	1
7	Keluarga Pionir	KK	-	-	2
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSKBM)	Lembaga	-	-	78
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	Orang	-	1	1
10	Penyuluh Sosial	Orang	13	2	15
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang	7	2	9
12	Dunia Usaha	Pengusaha	-	61	61

Sumber data: Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Berdasarkan data tersebut di atas pemerintah daerah dapat menyusun program yang tepat sasaran. Informasi yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, dalam tahun 2019 telah dilakukan berbagai upaya penanganan antara lain :

1) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
2) Mengusulkan penyediaan SDM sesuai dengan kebutuhan kepada Badan Kepegawaian Daerah;
3) Dalam rangka penanganan kemiskinan tahun 2019 diupayakan dengan memberikan pelayanan, bantuan dan perlindungan sosial melalui kegiatan :
    a) Pemberian bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni/bedah rumah, dengan sumber anggaran dari : APBD Kab. Buleleng sebanyak 48 unit, APBD Provinsi Bali sebanyak 561 unit, Kemenpera sebanyak 844 unit.
    b) Pemberian bantuan bagi keluarga miskin melalui kegiatan :
        - Bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) keluarga fakir miskin
        - Bantuan program keluarga harapan (PKH)
        - Bantuan asistensi sosial orang dengan kecacatan (ASSODK)
        - Bantuan asistensi sosial lanjut usia terlantar (ASLUT)
        - Program kesejahteraan sosial anak (PKSA)
        - Program lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)
        - Program penanggulangan kemiskinan lainnya melalui program dan kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Buleleng.

4.1.5.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Kawin.

Data penduduk menurut status kawin menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk dengan status kawin, belum kawin dan cerai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan konsep perkawinan difokuskan pada keadaan dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama secara sah (de jure) maupun tanpa pengesahan perkawinan (de facto). Indikator penduduk dengan status kawin berguna bagi penentu kebijakan dalam mengembangkan program-program pembangunan keluarga dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan Keluarga Berencana.

Tabel 18. Distribusi Penduduk menurut Status Kawin dirinci menurut Kecamatan Kabupaten Buleleng Tahun 2019

Kecamatan	Status Kawin								Jumlah Penduduk
	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati		
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gerokgak	501	0,06	25.924	3,15	542	0,07	2.351	0,29	99.523
Seririt	973	0,12	25.033	3,04	861	0,10	2.839	0,34	97.675
Busungbiu	311	0,04	13.975	1,70	322	0,04	1.079	0,13	55.441
Banjar	712	0,09	23.685	2,88	691	0,08	2.341	0,28	89.680
Sukasada	523	0,06	22.528	2,74	734	0,09	1.841	0,22	90.969
Buleleng	1.812	0,22	37.882	4,60	1.548	0,19	4.267	0,52	154.070
Sawan	659	0,08	21.547	2,62	676	0,08	2.116	0,26	85.151
Kubutambahan	456	0,06	18.773	2,28	439	0,05	1.500	0,18	72.491
Tejakula	559	0,07	20.124	2,44	389	0,05	1.801	0,22	78.395
Kab.Buleleng	**6.506**	**0,79**	**209.471**	**25,44**	**6.202**	**0,75**	**20.135**	**2,45**	**823.395**

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng 2019, Diolah.

Dari tabel 18 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Buleleng yang berstatus belum kawin tercatat sebanyak 6.506 orang atau sebanyak 0,79% dari jumlah penduduk, yang berstatus kawin sebanyak 209.471 orang atau 25,44% dari jumlah penduduk, yang berstatus cerai hidup sebanyak 6.202 orang atau sebanyak 0,75% dari jumlah penduduk, dan yang berstatus cerai mati sebanyak 20.135 orang atau sebanyak 2,45%. Jika data distribusi penduduk dengan status kawin dilihat berdasarkan kecamatan dapat disampaikan informasi sebagai berikut :

a. Penduduk dengan status belum kawin

Diantara 9 (Sembilan) kecamatan, Kecamatan Buleleng memiliki jumlah penduduk dengan status belum kawin sebanyak 1.812 orang atau 0,22%. Angka tersebut merupakan angka tertinggi bila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya antara lain Kecamatan Seririt 0,12%, Kecamatan Banjar 0,09%, Kecamatan Sawan sebesar 0,08%, Kecamatan Tejakula 0,07%, Kecamatan Gerokgak 0,06%, Kecamatan Sukasada sebesar 0,06%, Kecamatan Kubutambahan sebesar 0,06% dan Kecamatan Busungbiu 0,04%.

b. Penduduk dengan status kawin.

Berdasarkan data tabel 18 di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Buleleng memiliki persentase penduduk dengan status kawin sebanyak 4,60% lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya seperti Kecamatan Gerokgak 3,15%, Kecamatan Seririt 3,04%, Kecamatan Banjar sebesar 2,88%, Kecamatan Sukasada

2,74%, Kecamatan Sawan 2,62%, Kecamatan Tejakula 2,44%, Kecamatan Kubutambahan 2,28% dan Kecamatan Busungbiu 1,70%.

c. Penduduk dengan status Cerai Hidup.

Persentase jumlah penduduk dengan status cerai hidup di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 tercatat sebanyak 6.202 orang atau sebesar 0,75% dari jumlah penduduk. Jika angka-angka ditelusuri per kecamatan maka persentase penduduk pada status cerai hidup di Kecamatan Buleleng sebesar 0,19% terlihat paling tinggi dan yang terendah ada di Kecamatan Busungbiu sebesar 0,04%.

d. Penduduk dengan status Cerai Mati.

Jumlah penduduk dengan status cerai mati di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 terbanyak ada di Kecamatan Buleleng dengan angka 0,52% disusul oleh Kecamatan Seririt 0,34% dan Kecamatan Busungbiu merupakan kecamatan dengan persentase penduduk dengan status cerai mati terkecil yaitu sebesar 0,13%.

4.1.6 Keluarga

Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih memiliki hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga sangat dibutuhkan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan

pangan, pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi keluarga antara lain :

4.1.6.1 Jumlah Keluarga Dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga dimana diasumsikan semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahteraannya. Rata-rata jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga luas menjadi keluarga kecil.

Rata-rata jumlah anggota keluarga dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AK = \frac{\sum Pddk}{\sum KK} \times 100\%$$

Dimana :
AK : Rata-rata jumlah anggota keluarga
$\sum Pddk$: Jumlah penduduk
$\sum$ KK : Jumlah Kepala Keluarga

Tabel 19. Jumlah Penduduk, Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Keluarga Kabupaten Buleleng Tahun 2019.

Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah KK		Rata-Rata Anggota Keluarga
	N (Jiwa)	%	N (Jiwa)	%	
1	2	3	4	5	6
Gerokgak	99.523	12,09	29.303	12,09	3,40
Seririt	97.675	11,86	29.689	12,25	3,29
Busungbiu	55.441	6,73	15.677	6,47	3,54
Banjar	89.680	10,89	27.425	11,32	3,27
Sukasada	90.969	11,05	25.618	10,57	3,55
Buleleng	154.070	18,71	45.597	18,82	3,38
Sawan	85.151	10,34	24.987	10,31	3,41
Kubutambahan	72.491	8,80	21.160	8,73	3,43
Tejakula	78.395	9,52	22.858	9,43	3,43
KAB BULELENG	**823.395**	**100**	**242.314**	**100**	**3,40**

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng, 2019, Diolah

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 19 diketahui bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng tahun 2019 tercatat sebanyak 823.395 orang, sementara itu jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Buleleng pada akhir tahun 2019 tercatat 242.314 keluarga. Dengan angka-angka tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata anggota keluarga di Kabupaten Buleleng sebanyak 3,40 yang artinya bahwa setiap keluarga di Kabupaten Buleleng memiliki jumlah anggota keluarga rata-rata 3 orang.

4.1.6.2 Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga (SHDK)

Data hubungan dengan kepala keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal bersama (living arrangement) dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, keponakan, orang tua dan mertua termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama seperti pembantu rumah tangga.

Berdasarkan database hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) akhir tahun 2019, disajikan data status hubungan dengan kepala keluarga (SHDK) di Kabupaten Buleleng sebagaimana tertuang pada tabel 20.

Berdasarkan angka-angka pada tabel 20 dinyatakan bahwa dari 235.171 kepala keluarga laki-laki sebanyak 210.654 orang masih memiliki istri, akan tetapi dari 24.517 orang kepala keluarga perempuan hanya 43 orang saja yang masih bersuami. Mengingat kepala keluarga perempuan juga membiayai anak, menantu, cucu, orangtua, atau family lain, maka angka tersebut menunjukkan betapa beban kepala keluarga perempuan cukup memprihatinkan.

Tabel 20. Distribusi Penduduk Laki Dan Perempuan Menurut Status Hubungan Dengan Keluarga (SHDK) Kabupaten Buleleng Tahun 2019.

SHDK	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
Kepala Keluarga	214.816	27.498	242.314
Suami	43	0	43
Istri	0	196.576	196.576
Anak	187.417	156.962	344.379
Menantu	22	588	610
Cucu	1.999	1.817	3.816
Orangtua	4.245	11.443	15.688
Mertua	19	144	163
Family Lain	5.942	13.419	19.361
Pembantu	10	27	37
Lainnya	94	314	408
JUMLAH	**414.607**	**408.788**	**823.395**

Sumber : Database Disdukcapil Kab. Buleleng, 2019, Diolah

4.1.6.3 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur.

Informasi tentang kelompok umur dari kepala keluarga dan anggota keluarga sangat penting untuk diketahui terutama untuk melakukan analisis kondisi demografi keluarga serta perencanaan kebijakan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan dan lain-lainnya. Berdasarkan database SIAK akhir tahun 2019 disajikan data kepala keluarga berdasarkan kelompok umur lima tahunan mulai kelompok umur 15 - 19 tahun hingga kelompok umur lebih besar dari 75 tahun di Kabupaten Buleleng sebagaimana tabel berikut :

Tabel 21 Distribusi Kepala Keluarga menurut Kelompok Umur dan Status Kawin Kabupaten Buleleng Tahun 2019

Kelompok Umur	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati		Jumlah	%
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan		
0-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15-19	17	24	35	0	0	0	0	0	76	0,03
20-24	251	215	2.710	31	15	17	2	16	3.257	1,34
25-29	391	231	13.414	245	146	119	20	51	14.617	6,03
30-34	251	218	21.947	349	382	310	66	346	23.869	9,85
35-39	239	236	27.957	482	640	418	138	488	30.598	12,63
40-44	235	260	27.772	531	596	495	214	755	30.858	12,73
45-49	220	258	26.642	550	520	378	296	1106	29.970	12,37
50-54	206	304	23.907	605	373	289	359	1605	27.648	11,41
55-59	143	341	18.396	590	197	213	483	1879	22.242	9,18
60-64	108	346	14.943	591	144	158	571	2095	18.956	7,82
65-69	83	284	11.256	550	65	121	566	2128	15.053	6,21
70-74	49	240	7.090	474	32	69	500	1996	10.450	4,31
75+	69	272	8.835	579	50	89	1.275	3551	14.720	6,07
Jumlah	**2.262**	**3.229**	**204.904**	**5.577**	**3.160**	**2.676**	**4.490**	**16.016**	**242.314**	**100,00**

Sumber : Database Disdukcapil Kab.Buleleng, 2019, Diolah.

Dari table 21 dapat diketahui bahwa persentase kepala keluarga terbanyak di Kabupaten Buleleng berada pada kelompok umur 40 - 44 tahun yaitu 12,73%. Jumlah tersebut hanya berbeda sedikit dengan kepala keluarga yang ada pada kelompok umur 35 - 39 tahun sebesar 12,63% dan kepala keluarga pada kelompok umur 45 - 49 tahun yaitu sebanyak 12,37%.

Yang menarik adalah adanya kepala keluarga pada kelompok umur 15 - 19 tahun, walau jumlahnya mencapai 76 kepala keluarga (0,03%) namun sebagaimana kita ketahui bahwa penduduk pada kelompok umur tersebut merupakan masa/usia sekolah pada tingkat SLTA hingga perguruan tinggi. Jika mereka tersebut ada pada usia 15 - 17 tahun maka dapat dipastikan mereka berhenti menuntut ilmu pendidikan. Itu adalah angka yang terlaporkan dan terekam dalam database kependudukan, akan tetapi di lapangan angka tersebut mungkin lebih banyak. Oleh karena itu angka tersebut harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Buleleng.

Di samping adanya kepala keluarga pada kelompok umur 15 - 19 tahun, yang menarik dari data pada table 21 di atas adalah adanya kepala keluarga yang berumur 75 tahun ke atas sebanyak 14.720 orang.

4.1.6.4 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Sebagaimana umumnya di Indonesia dan di Kabupaten Buleleng pada khususnya, masih ada adigium bahwa laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga padahal dalam kenyataannya tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga karena pasangan hidupnya meninggal, cerai atau sebab-sebab lainnya.

Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya di masa depan dan bagaimana sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan. Persentase kepala keluarga jenis kelamin perempuan tersebut dapat juga menggambarkan tingkat perceraian, baik tingkat perceraian hidup maupun cerai mati di suatu tempat dan pada waktu tertentu. Berikut disajikan data jumlah Kepala Keluarga berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Buleleng dirinci berdasarkan kecamatan.

Tabel 22 Jumlah Kepala Keluarga menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Kepala Keluarga				Jumlah	
		Laki-Laki		Perempuan			
		N	%	N	%	N	%
	1	2	3	4	5	6	7
1	Gerokgak	26.438	6,38	2.865	0,70	29.303	3,56
2	Seririt	25.727	6,21	3.962	0,97	29.689	3,61
3	Busungbiu	14.244	3,44	1.433	0,35	15.677	1,90
4	Banjar	24.275	5,85	3.150	0,77	27.425	3,33
5	Sukasada	22.993	5,55	2.625	0,64	25.618	3,11
6	Buleleng	39.286	9,48	6.311	1,54	45.597	5,54
7	Sawan	21.983	5,30	3.004	0,73	24.987	3,03
8	Kubutambahan	19.159	4,62	2.001	0,49	21.160	2,57
9	Tejakula	20.711	5,00	2.147	0,53	22.858	2,78
Jumlah		**214.816**	**51,81**	**27.498**	**6,73**	**242.314**	**29,43**

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng 2019, Diolah

Dari tabel 22 dapat diketahui jumlah kepala keluarga laki-laki di Kabupaten Buleleng mencapai jumlah 214.816 orang atau sebesar 51,81%, sedangkan jumlah kepala keluarga perempuan tercatat sebanyak 27.498 orang atau sebesar 6,73%. Walaupun angka persentase kepala keluarga perempuan hanya 6,73% akan tetapi angka tersebut dapat menggambarkan tingkat perceraian yang terjadi di Kabupaten Buleleng, baik cerai hidup ataupun cerai mati. Oleh karena itu upaya peningkatan taraf hidup keluarga dengan kepala keluarga berjenis kelamin perempuan perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat rata-rata jumlah anggota keluarga per Kepala Keluarga di Kabupaten Buleleng mencapai angka 3 orang. Program pemberdayaan perempuan perlu menyasar kepala Keluarga tersebut sehingga angka partisipasi sekolah di Kabupaten Buleleng dapat ditingkatkan. Untuk itulah maka data jumlah KK perempuan dimasing-masing kecamatan sangat penting dijadikan acuan dalam penyusunan program kegiatan pembangunan di Kabupaten Buleleng dan masing-masing Kecamatan.

Jika karakteristik KK perempuan tersebut dilihat berdasarkan kecamatan, terlihat bahwa jumlah KK perempuan tertinggi ada di Kecamatan Buleleng sebanyak 1,54%, disusul oleh Kecamatan Seririt sebesar 0,97%, Kecamatan Banjar sebesar 0,77%, dan yang terendah ada di Kecamatan Busungbiu sebesar 0,35%.

4.1.6.5 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

Dalam konsep demografi, kepala keluarga merupakan seseorang baik laki maupun perempuan, berstatus menikah maupun tidak yang mempunyai peran, fungsi, tanggung jawab sebagai kepala keluarga secara ekonomi maupun sosial. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang, cerai hidup maupun cerai mati.

Dengan data jumlah keluarga berdasarkan status kawin sebagaimana tertuang pada tabel 23 dapat diketahui bahwa kepala keluarga yang berstatus kawin mencapai jumlah 242.314 orang atau sebesar 29,43% dari KK yang ada di Kabupaten Buleleng.

Selanjutnya kepala keluarga yang berstatus belum kawin/lajang tercatat sebanyak orang atau sebesar 0,84%. Persentase kepala keluarga berstatus cerai mati tercatat 1,19% atau sebanyak 4.931 orang, dan KK berstatus cerai hidup tercatat sebanyak 3.532 orang atau 0,85%.

Tabel 23. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin Kabupaten Buleleng Tahun 2019.

Status Kawin	Jenis Kelamin				Jumlah	
	Laki	%	Perempuan	%	N	%
1	2	3	4	5	6	7
Belum Kawin	3.485	0,84	3.021	0,74	6.506	0,79
Kawin	202.861	48,93	6.610	1,62	209.471	25,44
Cerai Hidup	3.532	0,85	2.670	0,65	6.202	0,75
Cerai Mati	4.931	1,19	15.204	3,72	20.135	2,45
Jumlah	**214.809**	**51,81**	**27.505**	**6,73**	**242.314**	**29,43**

Sumber : Database Disdukcapil Kab.Buleleng, 2019, Diolah

4.1.6.6 Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Oleh karena itu data karakteristik jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga.

Sajian data pada tabel 24 memberikan informasi bahwa dari 242.314 jumlah kepala keluarga di Kabupaten Buleleng, sebanyak 85.966 KK atau 20,73% tamatan pendidikan Sekolah Dasar/Sederajat, selanjutnya sebanyak 66.244 orang atau 15,98% tamatan SLTA/Sederajat, sebanyak 33.665 orang atau 8,12% berpendidikan SLTP Sederajat, yang tidak/belum Sekolah sebanyak 6.976 orang atau 1,68%, Diploma/Strata I sebanyak 11.121 atau 2,68%, tamatan Diploma I/II sebanyak 4.487 orang 1,08%, Tamatan Sarjana Muda/Akademi Diploma III sebanyak 3.047 orang atau 0,73%, Tamatan S2 sebanyak 818 orang 0,20% dan Tamatan Strata III sebanyak 110 orang atau sebesar 0,03%. Seperti yang tersaji dibawah ini :

Tabel 24 Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Buleleng Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2019

Pendidikan Akhir	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah KK	
	N	*%*	*N*	*%*	*N*	*%*
1	2	3	4	5	6	7
Tidak/Belum Sekolah	6.976	1,68	4.267	1,04	11.243	1,37
Belum Tamat SD	2.382	0,57	925	0,23	3.307	0,40
Tamat SD/Sederajat	85.966	20,73	14.322	3,50	100.288	12,18
SLTP/Sederajat	33.665	8,12	2.555	0,63	36.220	4,40
SLTA/Sederajat	66.244	15,98	4.134	1,01	70.378	8,55
Diploma I/II	4.487	1,08	221	0,05	4.708	0,57
Akademi Diploma III	3.047	0,73	259	0,06	3.306	0,40
Diploma/Strata I	11.121	2,68	761	0,19	11.882	1,44
Strata II	818	0,20	48	0,01	866	0,11
Strata III	110	0,03	6	0,00	116	0,01
Jumlah	**214.816**	**51,81**	**27.498**	**6,73**	**242.314**	**29,43**

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng Desember 2019, Diolah

Tingkat pendidikan Kepala Keluarga sangat berpengaruh terhadap penghasilan KK, semakin tinggi tingkat pendidikan KK kemungkinan penghasilannya juga semakin tinggi sebab untuk memasuki pasar kerja sector formal dibutuhkan persyaratan tingkat pendidikan. Oleh karena itu jika tingkat pendidikan KK tamatan SLTA, Diploma, Sarjana muda, Strata I, Strata II dan Strata III dijumlahkan, maka jumlah KK nya hanya mencapai 20,70% atau sebanyak 85.827 KK.

Terbatasnya lapangan kerja dan ketatnya persaingan kerja, jelas akan berpengaruh pada lapangan kerja KK yang tidak bersekolah atau tidak tamat SD, sebab untuk memasuki lapangan usaha minimal mereka harus punya keterampilan untuk merebut lapangan usaha informal. Oleh karena itu patut diduga bahwa mereka semua bekerja pada sektor yang tidak memerlukan skill atau hanya menjual jasa tenaga fisiknya sebagai buruh tani, buruh perkebunan atau pada industri-industri kecil. Saat ini mereka yang hanya mampu pada jenjang pendidikan SLTA saja masih sulit mencari kerja. Oleh karena itu patut diduga pula bahwa keluarga yang mempunyai pendidikan rendah akan mempunyai pendapatan yang rendah pula, sebagai akibatnya mereka akan tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya.

4.1.6.7 Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Status Bekerja.

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota keluarganya. Oleh karena itu informasi mengenai Kepala Keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

Dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga, data pada tabel 25 memberi petunjuk bahwa dari 234.166 kepala keluarga atau sejumlah 218.645 KK pada tahun 2018 sudah bekerja yang terdiri dari 202.412 KK laki-laki dan 16.233 KK perempuan. Selanjutnya kepala keluarga dengan status belum bekerja tercatat sebanyak 6.496 orang atau 0,70%, mengurus Rumah Tangga sebanyak 5.066 atau 0,67%, sebagai pelajar/Mahasiswa sebanyak 1.188 orang atau 0,11% dan KK dengan status pensiun mencapai 2.771 KK atau 1,20%.

Jika Jumlah KK dengan status belum bekerja dan KK dengan status Pelajar/ Mahasiswa dijumlahkan maka didapat angka sebanyak 7.684 KK atau sebanyak 0,93%. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa KK tersebut belum memiliki penghasilan tetap dan memungkinkan memunculkan masalah-masalah sosial. Untuk itu perlu menjadi perhatian pemerintah daerah berkaitan dengan adanya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja, mereka terdiri dari 4.374 KK laki-laki dan 2.122 KK perempuan. Seperti yang tersaji pada table dibawah ini :

Tabel 25. Distribusi Kepala Keluarga menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Buleleng Tahun 2019.

NO	STATUS PEKERJAAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N (jiwa)	%	N (jiwa)	%	N (jiwa)	%
1	Bekerja	204.979	49,44	17.758	4,34	222.737	27,05
2	Belum/Tidak Bekerja	5.335	1,29	2.773	0,68	8.108	0,98
3	Mengurus Rumah Tangga	1	0,00	6.281	1,54	6.282	0,76
4	Pelajar/Mahasiswa	1.939	0,47	434	0,11	2.373	0,29
5	Pensiunan	2.562	0,62	252	0,06	2.814	0,34
JUMLAH		**214.816**	**51,81**	**27.498**	**6,73**	**242.314**	**29,43**

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng, 2019, Diolah

4.2 Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk biasanya diukur dari tingkat kesehatan, pendidikan, masalah sosial dan lain sebagainya. Secara internasional kualitas pembangunan manusia di ukur dengan indikator Indek Pembangunan Manusia yang terdiri dari tingkat pendidikan (Melek huruf dan rata-rata lama sekolah), Kesehatan (angka kematian bayi dan angka harapan hidup waktu lahir) serta tingkat kesejahteraan yang di ukur dengan penghasilan per kapita.

4.2.1 Kesehatan.

Indikator kesehatan biasanya diukur dari kelahiran yang meliputi angka kelahiran, pemerikasaan ante dan post natal, pelayanan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, angka kesakitan dan kematian bayi serta kematian Ibu. Berikut gambaran kualitas penduduk Kabupaten Buleleng tahun 2019.

4.2.1.1 Kelahiran (Fertilitas)

Kelahiran atau fertilitas merupakan salah satu indikator kualitas penduduk karena indikator-indikator kelahiran ini sangat berguna untuk menentukan kebijakan dan perencanaan program pembangunan sosial terutama kesejahteraan Ibu dan Anak. Kelahiran merupakan salah satu faktor penambah jumlah penduduk di samping migrasi masuk. Jumlah kelahiran membawa konsekuensi pada penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak yang dilahirkan seperti gizi dan kecukupan kalori, perawatan kesehatan, kebutuhan sandang dan lainnya.

Kabupaten Buleleng memiliki 20 buah Puskesmas yang tersebar pada 9 (Sembilan) kecamatan. Berdasarkan data kelahiran dari masing-masing Puskesmas yang ada di Kabupaten Buleleng kemudian dikelompokkan berdasarkan kecamatan, dapat disajikan data jumlah kelahiran hidup sebagai berikut.

Tabel 26. Jumlah Kelahiran Hidup dirinci berdasarkan Kecamatan Kabupaten Buleleng tahun 2019.

No	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP	
			N (Jiwa)	%
	2	3	4	5
1	TEJAKULA	Tejakula I	525	4,98
		Tejakula II	389	3,69
2	KUBUTAMBAHAN	Kubutambahan I	512	4,85
		Kubutambahan II	431	4,08
3	SAWAN	Sawan I	738	6,99
		Sawan II	295	2,80
4	BULELENG	Buleleng I	1.200	11,37
		Buleleng II	401	3,80
		Buleleng III	694	6,58
5	SUKASADA	Sukasada I	876	8,30
		Sukasada II	456	4,32
6	BANJAR	Banjar I	802	7,60
		Banjar II	289	2,74

7	SERIRIT	Seririt I	418	3,96
		Seririt II	337	3,19
		Seririt III	146	1,38
8	BUSUNGBIU	Busungbiu I	325	3,08
		Busungbiu II	137	1,30
9	GEROKGAK	Gerokgak I	878	8,32
		Gerokgak II	617	5,85
JUMLAH (KAB/KOTA)			**10.466**	**99,18**

Keterangan : *). Data kecamatan diperoleh dengan mengelompokkan data kelahiran dari masing-masing Puskesmas di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Buleleng, 2019, Data diolah.

Jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Buleleng tahun 2019 berdasar data pada table 26 tercatat sebanyak 10.466 kelahiran hidup. Jika dilihat berdasarkan kecamatan, jumlah kelahiran hidup terbanyak terjadi di Kecamatan Buleleng yaitu 2.295 kelahiran hidup atau 21,75%, diikuti oleh Kecamatan Gerokgak dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 1.495 atau 14,17%, Kecamatan Sukasada sebanyak 1.332 kelahiran hidup atau sebanyak 12,62%. Sementara itu jumlah kelahiran hidup terendah berada di Kecamatan Busungbiu yaitu sebanyak 462 kelahiran hidup atau sebanyak 4,38%.

4.2.1.2 Rasio Anak dan Perempuan.

Rasio Anak dan Perempuan (**Child Women Ratio/CWR**) adalah perbandingan antara anak dibawah usia 5 (lima) tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia 15 - 49 tahun di suatu tempat dan waktu tertentu. Rasio ini berguna sebagai indikator fertilitas penduduk apabila tidak ada data kelahiran dan data registrasi. Untuk menghitungnya digunakan rumus :

$$CWR = \frac{P_{0-4}}{P_{15-49}} \text{ x K}$$

CWR = Child Women Ratio (Rasia Anak Perempuan).

P_{0-4} = Jumlah penduduk umur dibawah 5 tahun

P_{15-49} = Jumlah penduduk perempuan umur 15 - 49 tahun

K = Konstanta = 100

Dari tabel 27 dapat diketahui bahwa angka rasio anak perempuan (*Child Women Ratio/CWR)* di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 sebesar 23,61 orang. Ini berarti pada setiap jumlah 100 orang perempuan berusia 15 - 49 tahun terdapat sebanyak 23 - 24 orang anak yang berusia 0 - 4 tahun/di bawah 5 (lima) tahun.

Tabel 27. Rasio Anak dan Perempuan Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2019

Kecamatan	Perempuan (15 - 49) tahun	Anak (0 - 4) tahun	C W R
1	2	3	4
Gerokgak	27.670	6.835	24,70
Seririt	26.237	6.000	22,87
Busungbiu	14.272	3.021	21,17
Banjar	24.101	5.167	21,44
Sukasada	24.989	6.044	24,19
Buleleng	42.099	10.050	23,87
Sawan	22.678	5.558	24,51
Kubutambahan	19.814	4.679	23,61
Tejakula	20.736	5.205	25,10
JUMLAH	**222.596**	**52.559**	**23,61**

Sumber : Database SIAK Dukcapil Kab. Buleleng, 2019, diolah.

Jika dilihat berdasarkan kecamatan, angka rasio anak perempuan/CWR tertinggi berada di Kecamatan Tejakula dengan rasio sebesar 25,10 orang anak kemudian disusul oleh Kecamatan Gerokgak dengan rasio sebesar 24,70 orang anak, Kecamatan Sawan dengan rasio 24,51 orang anak dan yang terendah ada di Kecamatan Busungbiu dengan rasio 21,17 orang anak.

4.2.1.3 Kematian (Mortalitas)

4.2.1.3.1 Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate - IMR)

Angka kematian bayi merupakan jumlah kematian bayi yang terjadi dari sejak dilahirkan sampai dengan umur kurang dari 1 (satu) tahun. Angka kematian bayi bisa dirinci menjadi angka kematian *neonatal* (umur 0 - 28 hari) dan angka kematian post natal (1 - 12 bulan).

Tabel 28. Jumlah Kematian Bayi Kabupaten Buleleng Tahun 2019.

No	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR MATI	
			N (Jiwa)	%
	2	*3*	*4*	*5*
1	TEJAKULA	Tejakula I	10	0,09
		Tejakula II	1	0,01
2	KUBUTAMBAHAN	Kubutambahan I	0	0,00
		Kubutambahan II	0	0,00
3	SAWAN	Sawan I	8	0,08
		Sawan II	1	0,01
4	BULELENG	Buleleng I	5	0,05
		Buleleng II	1	0,01
		Buleleng III	1	0,01
5	SUKASADA	Sukasada I	0	0,00
		Sukasada II	3	0,03

6	BANJAR	Banjar I	4	0,04
		Banjar II	4	0,04
7	SERIRIT	Seririt I	6	0,06
		Seririt II	1	0,01
		Seririt III	1	0,01
8	BUSUNGBIU	Busungbiu I	1	0,01
		Busungbiu II	1	0,01
9	GEROKGAK	Gerokgak I	10	0,09
		Gerokgak II	4	0,04
JUMLAH (KAB/KOTA)			**62**	**0,59**

Keterangan : *). Data kecamatan diperoleh dengan mengelompokkan data kelahiran dari masing-masing Puskesmas diwilayah kecamatan yang bersangkutan.
Sumber : Data Dinas Kesehatan, 2019, Diolah

Berdasarkan data yang tertuang pada tabel 28 diperoleh informasi jumlah kematian bayi di Kabupaten Buleleng selama tahun 2019 berjumlah sebanyak 62 orang. Jumlah kematian bayi terbanyak berada di Kecamatan Gerokgak yaitu sebanyak 14 orang atau 0,13%, disusul oleh Kecamatan Tejakula sebanyak 11 orang atau sebesar 0,10%, Kecamatan Sawan sebanyak 9 orang atau sebesar 0,09%, Kecamatan Banjar sebanyak 8 orang atau sebesar 0,08%, Kecamatan Seririt sebanyak 8 orang atau sebesar 0,08%, Kecamatan Buleleng sebanyak 7 orang atau sebesar 0,07%, Kecamatan Sukasada sebanyak 3 orang atau sebesar 0,03%, Kecamatan Busungbiu sebanyak 2 orang atau sebesar 0,02%, dan Kecamatan Kubutambahan sebanyak 0 orang atau sebesar 0,00%.

4.2.1.3.2 Angka Kematian Anak Balita

Angka kematian anak dan balita merujuk pada kejadian kematian pada anak berumur 1 tahun sampai sebelum tepat berumur 5 tahun. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, angka kematian anak balita pada tahun 2018 tercatat sebesar 0,4 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 1,0 per 1.000 kelahiran hidup. Angka tersebut memberi informasi bahwa pada setiap 1.000 kelahiran hidup sampai berumur tepat 5 tahun terdapat anak balita yang meninggal sebanyak 1 orang.

4.2.1.3.3 Angka Kematian Ibu

Kematian ibu adalah kematian perempuan karena kehamilan, persalinan dan nifas dan bukan disebabkan oleh hal-hal lain seperti penyakit maupun kecelakaan. Untuk menghitung angka kematian ibu secara langsung dibutuhkan data ibu yang meninggal karena sebab-sebab kehamilan, persalinan dan nifas serta jumlah bayi yang dilahirkan dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng disampaikan bahwa angka kematian Ibu tahun 2019 adalah sebesar 9 per kelahiran hidup. Itu berarti bahwa pada setiap 100.000 ibu melahirkan terjadi kematian ibu sebanyak 9 orang. Angka tersebut lebih rendah atau telah menurun jika dibandingkan dengan angka kematian ibu tahun 2016 sebesar 14 per 100.000 kelahiran hidup yang berarti untuk setiap 100.000 ibu melahirkan terjadi kematian ibu sebanyak 14 orang.

4.2.2 Indikator Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, indikator pendidikan diklasifikasikan menurut bentuk pendidikan, yaitu (1) pendidikan umum, (2) pendidikan masyarakat dan (3) pendidikan kedinasan. Karena keterbatasan data pada Database SIAK Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka ulasan kualitas penduduk dari aspek pendidikan menggunakan data yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng. Adapun data yang akan disajikan antara lain menyangkut Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

4.2.2.1 Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf yang diukur adalah angka melek huruf penduduk umur 15 tahun ke atas. Makin tinggi angka melek huruf maka semakin baik tingkat pengetahuan dan mutu sumber daya manusianya.

Tabel 29. Angka Melek Huruf Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2019

TAHUN	% ANGKA MELEK HURUF (AMH)
1	2
2017	98,46
2018	90,80
2019	91,36

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2019.

Berdasarkan data yang tertuang dalam table 29, pembangunan pendidikan di Kabupaten Buleleng di ukur melalui angka melek huruf tahun 2016 hingga 2019 sudah menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan, ini terlihat dari peningkatan angka melek huruf dari 900 pada tahun 2013 menjadi 0 pada tahun 2014 naik menjadi 910, serta 300 di tahun 2015.

Indikator angka melek huruf tersebut merupakan indikator output yang tidak dapat dicapai dengan singkat karena melibatkan penduduk baik penduduk umur muda maupun umur tua. Usaha-usaha pemerintah dalam rangka pemberantasan buta aksara baik penyediaan sarana maupun prasarana pendidikan serta keringanan biaya sekolah melalui dana BOS dapat merangsang penduduk untuk tetap menyekolahkan anak-anaknya. Akan tetapi untuk penduduk yang sudah tidak berada dalam usia sekolah diperlukan strategi dan perhatian khusus untuk dapat memberantas buta aksara. Selain itu, kemudahan akses terhadap pendidikan merupakan faktor penting dalam menekan angka buta huruf.

4.2.2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Partisipasi sekolah merupakan salah satu ukuran yang digunakan dalam menilai keberhasilan program wajib belajar. Angka partisipasi sekolah mengukur daya serap sektor pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dimana angka ini memperhitungkan adanya perubahan umur penduduk terutama penduduk umur muda, namun demikian meningkatnya persentase jumlah murid bukan berarti partisipasi sekolah juga meningkat, hal ini disebabkan karena ukuran perubahan jumlah murid sekolah tidak langsung berpengaruh terhadap partisipasi sekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikann batasan umurnya dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok umur yang sesui pada jenjang/tingkat pendidikannya. Dengan keterbatasan data, pada profil ini analisis APK yang dilakukan hanya pada 2 (dua) jenjang/tingkat pendidikan yaitu SD dan SLTP dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{APK SD} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Yang Bersekolah di SD}}{\text{Jumlah Penduduk Usia } 7-12 \text{ tahun}} \text{ x } 100$$

$$\text{APK SLTP} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Yang Bersekolah di SLTP}}{\text{Jumlah Penduduk Usia } 13-15 \text{ tahun}} \text{ x } 100$$

Tabel 30. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SLTP Kabupaten Buleleng Tahun 2016- 2019.

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (%)			
	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5
SD/MI/Sederajat	106,15	107,50	104,46	0,37
SMP /MTs/Sederajat	99,54	99,30	104,23	0,59

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Buleleng, 2019,diolah.

Data pada tabel 30 menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kabupaten Buleleng dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat pada tahun 2016 meningkat menjadi 106,15% dan di tahun 2017 tercatat 107,50%, tahun 2018 tercatat 104,46%, dan tahun 2019 tercatat 0,37%.

Jika dikaitkan dengan jenjang umur anak SD yaitu 6 - 12 tahun, APK 0,37% mengindikasikan ada anak berusia di bawah umur 7 tahun sudah bersekolah ditingkat SD. Ini dimungkinkan karena kasadaran orang tua sebelum anaknya masuk SD terlebih dahulu memberikan kesempatan anaknya untuk masuk TK. Mulanya mereka merencanakan anaknya ikut TK 2 tahun akan tetapi karena perkembangan anaknya sangat baik maka TK nya hanya ikut 1 tahun dan langsung diteruskan sekolah di Sekolah Dasar.

Pada tahun 2016 APK SLTP mencapai angka 99,54%, tahun 2017 tercapai 99,30%, tahun 2018 tercapai 104,23%, dan ditahun 2019 tercatat 0,59%. Peningkatan APK tersebut disebabkan karena adanya Program Wajib Belajar 9 tahun dan kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya semakin meningkat. Bagi orang tua, merupakan kewajiban untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan setinggi-tingginya. Namun demikian lebih rendahnya APK anak SLTP jika dibandingkan dengan APK anak SD mengindikasikan bahwa ada anak tamat SD tidak melanjutkan pendidikan ke bangku SLTP.

4.2.2.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APK menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan tertentu. APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik dibandingkan dengan APK. Angka Partisipasi Murni dicari dengan menggunakan rumus :

$$\textbf{APM SD} \times 100 = \frac{\text{Jumlah Murid SD (umur 7 - 12) Th}}{\text{Jumlah Penduduk Usia (7 - 12) Th}}$$

$$\textbf{APM SLTP} \times 100 = \frac{\text{Jumlah Murid SLTP (umur 13 - 15) Th}}{\text{Jumlah Penduduk Usia (13 - 15) Th}}$$

$$\textbf{APM SLTA} \times 100 = \frac{\text{Jumlah Murid SLTA (umur 16 - 18) Th}}{\text{Jumlah Penduduk Usia (16 - 18) Th}}$$

Tabel 31. Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SLTP, dan SLTA, di Kabupaten Buleleng Tahun 2015 - 2019.

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
SD/MI/Sederajat	98,05	97,10	96,09	97,09	0,37
SMP /MTs/Sederajat	77,34	87,83	94,6	95,6	0,59
SMA/SMK Sederajat	75,01	79,2	64,52	74,52	0,90

Sumber: Dinas Pendidikan Kab Buleleng, 2019, Data diolah

Sajian data pada table 31 di atas menunjukkan persentase siswa dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK Kabupaten Buleleng dari tahun 2015 hingga 2019 sangat berfluktuatif.

Angka APM - SD/MI/sederajat di Kabupaten Buleleng pada tahun 2018 sebesar 97,09% berarti bahwa dari 100 orang penduduk yang berusia 7 - 12 tahun ada 2,91% yang tidak mengikuti pendidikan SD, namun jika dibandingkan dengan APM di tahun 2019 sebesar 0,37% maka APM ditahun 2019 menunjukkan penurunan, hal tersebut tentunya merupakan indikator kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Buleleng.

Faktor-faktor apa yang berpengaruh sehingga APM jenjang pendidikan dari SLTP, dan SLTA/SMK semakin meningkat, beberapa factor dari banyak faktor penentunya jelas berkaitan dengan keberhasilan kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta adanya peningkatan kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya agar memiliki pendidikan yang semakin baik.

4.2.3 Ekonomi

4.2.3.1 Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja

4.2.3.1.1 Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja

Man power atau tenaga kerja adalah seluruh penduduk dalam usia (15 - 64) tahun yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Indikator ini berguna sebagai bahan dalam pengambilan kebijaksanaan penyusunan rencana ketenagakerjaan. Di samping itu juga berguna untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja (penduduk usia kerja) potensial. Penghitungan persentase tenaga kerja dapat diketahui dengan membandingkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (usia kerja) dengan jumlah penduduk keseluruhan. Semakin besar jumlah tenaga kerja di suatu daerah maka penawaran tenaga kerja juga semakin tinggi.

Tabel 32. Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Buleleng Tahun 2019

No	Kecamatan	Tenaga Kerja	Jumlah Penduduk	% Tenaga Kerja
	1	2	3	4
1	Gerokgak	68.614	99.523	68,94
2	Seririt	67.497	97.675	69,10
3	Busungbiu	37.941	55.441	68,43
4	Banjar	62.244	89.680	69,41
5	Sukasada	62.039	90.969	68,20
6	Buleleng	106.861	154.070	69,36
7	Sawan	57.774	85.151	67,85
8	Kubutambahan	49.899	72.491	68,83

9	Tejakula	53.416	78.395	68,14
JUMLAH		**566.285**	**823.395**	**68,77**

Sumber : Database Disdukcapil Kabupaten Buleleng, 2019, diolah

Dari tabel 32 dapat diketahui dari 823.395 orang penduduk Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 sebanyak 566.285 orang atau 68,77% merupakan tenaga kerja. Jika dilihat berdasarkan kecamatan, jumlah tenaga kerja terbanyak ada di Kecamatan Buleleng sebanyak 106.861 orang disusul oleh Kecamatan Gerokgak sebanyak 68.614 orang, Kecamatan Seririt sebanyak 67.497 orang dan yang terendah ada di Kecamatan Busungbiu yakni sebanyak 37.941 orang, akan tetapi jika dilihat berdasarkan angka persentase tenaga kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk di kecamatan masing-masing, maka persentase rata-rata tenaga kerja di tiap kecamatan di Kabupaten Buleleng mencapai angka 68,77%. Persentase tenaga kerja tertinggi berada di Kecamatan Banjar dengan persentase mencapai 69,41%, disusul Kecamatan Buleleng 69,36% dan yang terendah ada di Kecamatan Sawan sebanyak 67,85%.

Tabel 33 Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Buleleng Tahun 2019.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Penduduk	% TK
	2	3	4	5
1	Laki-Laki	285.216	414.607	68,79
2	Perempuan	281.069	408.788	68,76
Jumlah		**566.285**	**823.395**	**68,77**

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng, 2019, Diolah

Berdasarkan Tabel 33 tentang jumlah tenaga tahun 2019 laki-laki tercatat sebanyak 285.216 orang dan tenaga kerja perempuan tercatat sebanyak 281.069 orang, dengan demikian proporsi tenaga kerja laki-laki yaitu sebesar 68,79% sejajar dengan proporsi tenaga kerja jenis kelamin perempuan yaitu 68,76%.

4.2.3.1.2 Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur/Pencari Kerja)

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan (menganggur) atau yang terlibat dan berusaha terlibat dalam kegiatan produktif.

Tabel 34 Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja di Kabupaten Buleleng Tahun 2019

No	Kecamatan	Angkatan Kerja	Proporsi Angkatan Kerja
	2	3	4
1	Gerokgak	44.048	44,26
2	Seririt	47.510	48,64
3	Busungbiu	27.730	50,02
4	Banjar	42.889	47,82
5	Sukasada	44.310	48,71
6	Buleleng	68.434	44,42
7	Sawan	40.266	47,29
8	Kubutambahan	37.906	52,29
9	Tejakula	33.775	43,08
JUMLAH		**386.868**	**46,98**

Sumber : Database Disdukcapil Kab.Buleleng, 2019, diolah.

Tabel 34 menampilkan data jumlah dan proporsi angkatan kerja di Kabupaten Buleleng pada tahun 2019. Dari data tersebut dapat diketahui jumlah angkatan kerja di Kabupaten Buleleng sebanyak 386.868 orang tersebar di 9 (Sembilan) kecamatan. Secara absolute dan persentase jumlah angkatan kerja di Kabupaten Buleleng paling banyak ada di Kecamatan Buleleng yaitu sebanyak 68.434 orang (44,42%), disusul Kecamatan Seririt sebanyak 47.510 orang (48,64%), Kecamatan Sukasada sebanyak 44.310 orang (48,71%) dan yang terkecil ada di Kecamatan Busungbiu sebanyak 27.730 (50,02%).

4.2.3.1.3 Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) menggambarkan banyaknya angkatan kerja yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan dari penduduk yang berusia 15 - 64 tahun. Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang benar-benar terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu.

Tabel 35 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Buleleng Tahun 2019.

No	Kecamatan	Tenaga Kerja	Angkatan Kerja	APAK
	1	2	3	4
1	Gerokgak	68.614	44.048	64,20
2	Seririt	67.497	47.510	70,39
3	Busungbiu	37.941	27.730	73,09
4	Banjar	62.244	42.889	68,90
5	Sukasada	62.039	44.310	71,42
6	Buleleng	106.861	68.434	64,04

7	Sawan	57.774	40.266	69,70
8	Kubutambahan	49.899	37.906	75,97
9	Tejakula	53.416	33.775	63,23
JUMLAH		**566.285**	**386.868**	**68,32**

Sumber : Database Disdukcapil Kab.Buleleng, 2019, diolah

Dari table 35 di atas dapat diketahui Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 secara keseluruhan mencapai angka 68,32%. Hal tersebut berarti dari 566.285 jumlah tenaga kerja di Kabupaten Buleleng 68,32% atau sebanyak 566.285 orang adalah penduduk yang berusia 15 - 64 tahun yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan.

Jika dilihat menurut kecamatan, APAK terbesar terdapat di Kecamatan Kubutambahan yaitu 75,97%, disusul oleh Kecamatan Busungbiu sebanyak 73,09%, Kecamatan Sukasada 71,42%, Kecamatan Seririt 70,39% dan yang terkecil ada di Kecamatan Tejakula yaitu sebesar 63,23%.

4.2.3.1.4 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Bekerja

Indikator ini menunjukkan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan terhadap jumlah penduduk yang bekerja di setiap lapangan pekerjaan. Proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan menunjukkan distribusi dan penyebaran penduduk yang bekerja di suatu daerahpada waktu tertentu. Indikator ini berguna untuk membantu pemerintah daerah dalam memfokukan kebijakan ketenagakerjaan.

Tabel 36 berikut menunjukkan proporsi jenis pekerjaan penduduk Kabupaten Buleleng yang berusia produktif (15 - 64 tahun), data di ambil menurut 20 jenis pekerjaan terbanyak.

Tabel 36. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Kabupaten Buleleng Tahun 2019.

NO	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH	%
	2	3	4
1	Petani/Pekebun/Buruh Tani/Buruh Perkebunan	137.782	16,73
2	Peternak/Buruh Peternakan	259	0,03
3	Nelayan/Perikanan/Buruh Perikanan	2.716	0,33
4	Karyawan Swasta	100.918	12,26
5	Karyawan Bumn	501	0,06
6	Karyawan Honorer & Kontrak	1.771	0,22
7	Buruh Harian Lepas	55.494	6,74
8	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	12.666	1,54
9	Tentara Nasional Indonesia ((TNI)	1.628	0,20
10	Kepolisian RI (POLRI)	1.896	0,23
11	Perdagangan	21.675	2,63
12	Industri	3.438	0,42
13	Transportasi	1.770	0,21
14	Wiraswasta	35.200	4,27
15	Guru	3.158	0,38
16	Dokter	175	0,02
17	Bidan	217	0,03

18	Perawat	240	0,03
19	Sopir	2.161	0,26
20	Pekerjaan Lainnya	2.838	0,34
Jumlah Penduduk Bekerja Kabupaten Buleleng		**386.503**	**46,94**

Sumber : Database Disdukcapil Kab.Buleleng 2018,diolah.

Berdasarkan tabel 36 didapat informasi bahwa penduduk yang bekerja di Kabupaten Buleleng sebanyak 386.503 orang atau 46,94% terserap pada pekerjaan sebagai petani/buruh tani/pekebun/buruh perkebunan sebanyak 137.782 orang atau 16,73%, disusul pada sebagian lapangan pekerjaan lainnya sebanyak 2.838 orang atau 0,34%, sebagai karyawan swasta sebanyak 100.918 orang atau 12,26%, sebagai buruh harian lepas sebanyak 55.494 orang atau 6,74%, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 12.666 orang atau 1,54%, Di sektor Industri sebanyak 3.438 orang atau 0,42%, Guru sebanyak 3.158 orang atau 0,38%.

4.2.3.1.5 Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja, atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan, atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 37. Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buleleng Tahun 2019

No	Kecamatan	Tenaga Kerja	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Bekerja	Tidak Bekerja	% Tingkat Pengangguran
	2	3	4	5	6	7	8
1	Gerokgak	68.614	44.048	24.566	37.975	30.639	69,56
2	Seririt	67.497	47.510	19.987	39.435	28.062	59,07
3	Busungbiu	37.941	27.730	10.211	24.358	13.583	48,98
4	Banjar	62.244	42.889	19.355	38.451	23.793	55,48
5	Sukasada	62.039	44.310	17.729	37.943	24.096	54,38
6	Buleleng	106.861	68.434	38.427	60.224	46.637	68,15
7	Sawan	57.774	40.266	17.508	35.618	22.156	55,02
8	Kubutambahan	49.899	37.906	11.993	33.067	16.832	44,40
9	Tejakula	53.416	33.775	19.641	30.321	23.095	68,38
JUMLAH		**566.285**	**386.868**	**179.417**	**337.392**	**228.893**	**59,17**

Sumber : Database Disdukcapil Kab. Buleleng, 2019, diolah.

Jumlah dan persentase pengangguran terbuka di Kabupaten Buleleng tahun 2019 sebagaimana tertuang pada tabel 37 tercatat sebanyak 228.893 orang atau 59,17% dari angkatan kerja sebanyak 386.868 orang. Jika dilihat berdasarkan kecamatan, jumlah pengangguran terbanyak ada di Kecamatan Buleleng dengan angka sebanyak 46.637 orang atau 68,15% dari jumlah angkatan kerja, disusul oleh Kecamatan Gerokgak dengan jumlah pengangguran sebanyak 30.639 orang atau 69,56% dari jumlah angkatan kerja yang ada di Kecamatan Gerokgak. Kecamatan dengan persentase pengangguran lebih tinggi dari rata-rata Kabupaten Buleleng antara lain Kecamatan Gerokgak, Tejakula, dan Buleleng.

4.3 Mobilitas Penduduk

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah administratif lainnya, yang merefleksikan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Analisis tentang migrasi atau mobilitas penduduk merupakan indikator yang penting bagi terlaksananya pembangunan manusia seutuhnya. Dalam profile ini indikator yang digunakan untuk menghitung arus migrasi adalah :

1) Migrasi Masuk ($\boldsymbol{M_i}$)
2) Migrasi Keluar ($\boldsymbol{M_o}$)

Ukuran-ukuran indikator tersebut bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu daerah merupakan daerah yang memiliki daya tarik bagi penduduk sekitarnya atau wilayah lainnya untuk melakukan migrasi. Sebaliknya juga menunjukkan apakah suatu daerah karena berbagai keterbatasan sumber daya, adanya tekanan atau alasan-alasan tertentu menjadi faktor pendorong bagi penduduk di wilayahnya untuk berpindah ke daerah lainnya.

4.3.1 Mobilitas Permanen

4.3.1.1 Migrasi masuk

Migrasi masuk merupakan angka yang menujukkan banyaknya penduduk yang masuk per 1000 penduduk di suatu Kabupaten/Kota tujuan dalam waktu satu tahun. Migrasi masuk dapat diukur dengan rumus :

$$\frac{M_i = Mig_{in}}{P} \text{ x K}$$

M_i = Angka Migrasi Risen Masuk
Mig_{masuk} = Jumlah penduduk masuk dalam satu periode
P = Jumlah penduduk pada periode sama
K = Konstanta = 1000

Berdasarkan data registrasi penduduk pindah datang Kabupaten Buleleng selama tahun 2019 diperoleh jumlah penduduk yang masuk untuk menetap ke Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

Tabel 38. Jumlah Migrasi Masuk Kabupaten Buleleng Tahun 2019

Kecamatan	Migrasi Masuk (Orang)			Jumlah Penduduk	Mi
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6
Gerokgak	253	434	687	99.523	6,90
Seririt	144	383	527	97.675	5,40
Busungbiu	76	231	307	55.441	5,54
Banjar	95	412	507	89.680	5,65

Sukasada	159	283	442	90.969	4,86
Buleleng	401	675	1.076	154.070	6,98
Sawan	92	415	507	85.151	5,95
Kubutambahan	70	370	440	72.491	6,07
Tejakula	61	370	431	78.395	5,50
Jumlah	**1.351**	**3.573**	**4.924**	**823.395**	**5,98**

Sumber : Data Dinas Dukcapil Kab. Buleleng, 2019 Diolah

Dari tabel 38 dapat diketahui jumlah penduduk masuk/datang ke Kabupaten Buleleng dari Januari sampai dengan Desember 2019 sebanyak 3.848 orang yang terdiri dari 1.351 orang dengan jenis kelamin laki-laki dan 3.573 orang perempuan. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 sebanyak 823.395 orang didapat Angka Migrasi Risen Masuk sebesar 5,98% yang berarti untuk setiap 1000 jumlah penduduk migrasi masuknya menyumbang angka 5 - 6 orang.

Mencermati angka migrasi risen masuk per kecamatan di Kabupeten Buleleng terlihat bahwa angka migrasi risen masuk paling tinggi yaitu sebesar 6,98% ada di Kecamatan Buleleng, disusul oleh Kecamatan Gerokgak dengan angka 6,90%, Kecamatan Kubutambahan sebesar 6,07%, Kecamatan Sawan 5,95% dan yang paling rendah yaitu Kecamatan Sukasada dengan angka migrasi masuk 4,86%. Dengan angka tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Kecamatan Buleleng, Gerokgak, Sukasada merupakan daerah tujuan kedatangan penduduk pendatang.

4.3.1.2 Migrasi Keluar

Migrasi Risen Keluar (M_o) menunjukkan banyaknya migran keluar dari suatu Kabupaten/ Kota per 1.000 penduduk daerah asal dalam waktu tertentu. Migrasi Risen Keluar dihitung dengan rumus :

$$M_o = \frac{Mig_{out}}{P} \text{ x K}$$

M_o = Angka Migrasi Risen keluar

Mig_{out} = Jumlah penduduk keluar dalam satu periode

P = Jumlah penduduk pada periode sama

K = Konstanta = 1.000

Dari tabel 39 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk keluar dari Kabupaten Buleleng secara keseluruhan pada tahun 2019 berjumlah 7.133 orang yang terdiri dari 2.852 orang migrasi keluar laki-laki dan 4.281 orang migrasi keluar perempuan.

Tabel 39. Migrasi Keluar di Kabupaten Buleleng tahun 2019

Kecamatan	Migrasi Keluar (Orang)			Jumlah Penduduk	Mo
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6
Gerokgak	243	339	582	99.523	5,85
Seririt	315	484	799	97.675	8,18
Busungbiu	225	391	616	55.441	11,11
Banjar	235	372	607	89.680	6,77

Sukasada	229	385	614	90.969	6,75
Buleleng	770	934	1.704	154.070	11,06
Sawan	391	577	968	85.151	11,37
Kubutambahan	205	364	569	72.491	7,85
Tejakula	239	435	674	78.395	8,60
Jumlah	**2.852**	**4.281**	**7.133**	**823.395**	**8,66**

Sumber : Data Dinas Dukcapil Kab. Buleleng, 2019, Diolah

Angka migrasi risen keluar Kabupaten Buleleng menunjukkan angka 8,66% ini berarti untuk setiap 1.000 orang penduduk di Kabupaten Buleleng jumlah penduduk yang keluar sebanyak 8 - 9 orang. Jika dibandingkan dengan angka migrasi risen masuk kabupaten Buleleng sebesar 5,98% maka peranan migrasi penduduk keluar terhadap perubahan jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk masuk. Hal tersebut terjadi tentunya disebabkan oleh banyak faktor salah satu diantaranya adalah karena jumlah angkatan kerja di Kabupaten Buleleng cukup tinggi, masih sempitnya kesempatan kerja di dalam daerah, terbukanya kesempatan kerja di luar daerah, skill tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Buleleng tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang tersedia di Kabupaten Buleleng, dan adanya kepindahan penduduk karena perkawinan.

4.3.1.3 Angka Migrasi Netto (nett-migration/Mn)

Angka ini merupakan selisih antara mingrasi masuk dan migrasi keluar. Apabila migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar maka disebut migrasi netto positif, sedangkan jika migrasi keluar lebih besar dari pada migrasi masuk disebut migrasi netto negatif.

Berdasarkan data tabel 38 dapat diketahui jumlah penduduk masuk/datang ke Kabupaten Buleleng dari Januari sampai dengan Desember 2019 sebanyak 3.848 orang yang terdiri dari 1.351 orang dengan jenis kelamin laki-laki dan 2.497 orang perempuan dan berdasarkan tabel 39 diketauhi bahwa jumlah penduduk keluar dari Kabupaten Buleleng secara keseluruhan pada tahun 2019 berjumlah 7.133 orang yang terdiri dari 2.852 orang migrasi keluar laki-laki dan 4.281 orang migrasi keluar perempuan. Dengan data tersebut berarti jumlah penduduk keluar lebih besar daripada jumlah penduduk masuk dengan selisih sebanyak 1.429 orang. Itu berarti sepanjang tahun 2019 di kabupaten Buleleng terjadi **migrasi netto negatif**.

4.3.2 Mobilitas Non Permanen.

Mengingat bentuk Negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didiami oleh berbagai jenis suku, ras, agama, dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, maka kehadiran penduduk pendatang ke Wilayah Kabupaten Buleleng merupakan suatu hal yang dapat diterima namun status dan identitas dirinya harus jelas sehingga tidak berstatus sebagai penduduk liar.

Walaupun fenomena penduduk pendatang terjadi sejak dulu, namun perhatian pemerintah Provinsi Bali umumnya dan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada khususnya terhadap penduduk pendatang mulai meningkat sejak terjadinya kasus Bom Bali I pada tahun 2001 dan Bom Bali II tahun 2004, oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi kependudukan yang dapat mengantisipasi kepastian data tentang Jumlah dan Identitas Penduduk Pendatang di Wilayah Kab. Buleleng yang secara langsung atau tidak langsung ikut serta mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat, maka kegiatan pengawasan terhadap penduduk pendatang di Kabupaten Buleleng perlu disikapi secara serius oleh semua pihak.

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan administrasi penduduk pendatang di kabupaten Buleleng dilandasi dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan penduduk pendatang antara lain :

1. Kesepakatan Bersama Gubernur Bali Dengan Bupati/ Walikota Se Bali Nomor : 153 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan Di Propinsi Bali.
2. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 72 Tahun 2003 Tentang Pendaftaran Dan Penertiban Penduduk Pendatang Di Kabupaten Buleleng.
3. Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 23 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Penduduk Pendatang Dan Orang Asing di Kabupaten Buleleng.

Hasil rekapitulasi jumlah penduduk Pendatang Tidak Menetap yang berasal dari hasil SIDAK (Insfeksi Mendadak) Tim Gabungan yang terdiri dari unsur Dinas Dukcapil Kab. Buleleng, Trantib Kec, Desa/Kelurahan, Unsur POLRI dan TNI, Linmas dan Unsur Desa Adat selama tahun 2019 disajikan pada tabel 40.

Tabel 40. Jumlah Penduduk Pendatang Tidak Menetap di Kabupaten Buleleng Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah Duktang Terdata	Jumlah Pelanggaran	Bentuk Pelanggaran				
				Tanpa KTP	Tanpa SKLD	SKLD Mati	Tanpa STPPTS	STTPTS Mati
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hasil Sidak Tim Gabungan	817	651	20	523	108	-	-
2	Hasil Pendataan Petugas Pengawasan Duktang	2.291	914	40	874	-	-	-
Jumlah		**3.108**	**1.565**	**60**	**1.397**	**108**	**-**	**-**

Sumber : Dinas Dukcapil Kab.Buleleng, 2019 Diolah

Berdasarkan data yang tertuang dalam tabel 40 di atas, dapat diketahui jumlah penduduk non permanen yang terdata sebanyak 3.108 orang dengan jumlah pelanggaran sebanyak 1.565 orang atau 50,35%, dengan rincian pelanggaran Tanpa SKLD 1.397 orang atau 44,95%, SKLD Mati 108 orang atau 3,47%, Tanpa KTP 60 orang atau 1,93%, serta penduduk Non Permanen yang memiliki SKLD sebanyak 166 orang atau 5,34%.

Sebagai tindak lanjut dari penduduk pendatang yang tidak punya KTP, Tim Sidak langsung menggiring yang bersangkutan ke Kantor Desa/Kelurahan setempat untuk dibuatkan berita acara sekaligus yang bersangkutan membuat surat pernyataan bahwa

dalam kurun waktu tertentu mereka harus melengkapi dirinya dengan KTP daerah setempat. Surat pernyataan bermaterai tersebut juga ditandatangani oleh Kades/Lurah dan Babinkamtibmas setempat. Selanjutnya yang bersangkutan dibawah pengawasan Babinkamtibmas dan Babinsa setempat.

Hal menarik yang diperoleh di lapangan (hasil sidak dari rumah kerumah penduduk) adalah banyaknya duktang dari luar provinsi Bali yang berjenis kelamin perempuan yang bekerja pada warung masing-masing dan kafe-kafe yang tersebar di Kecamatan Buleleng, Sukasada, Sawan, Seririt dan Gerokgak. Kenyataan ini telah menimbulkan kekawatiran sebagian besar masyarakat Buleleng akan tingginya angka AIDS dan masalah-masalah sosial lainnya. Oleh karena itu pemerintah Daerah bersama-sama instansi terkait lainnya perlu duduk bersama mencari solusi agar dampak negatif penduduk pendatang yang bekerja pada kafe-kafe dapat diminimalkan.

BAB V

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen Kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian wajib dimiliki oleh Penduduk Indonesia karena dokumen tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Akta kelahiran misalnya menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian menunjukkan hubungan perdata dengan ahli warisnya, demikian juga akta-akta lainnya. Kepemilikan dokumen kependudukan selain mempunyai kekuatan legal juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sementara bagi pemerintah akan sangat bermanfaat dalam segala bidang kegiatan pembangunan terutama dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk, pelayanan publik dan memperkuat database penduduk.

5.1 Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh Keluarga. Kartu Keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Oleh karena itu KK merupakan identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, pendidikan. Untuk menghindari kepala keluarga ganda maka perempuan bisa

menjadi kepala keluarga karena status perkawinannya janda atau karena menjadi istri kedua dan sterusnya dari seorang laki-laki, sedangkan suaminya menjadi kepala keluarga hanya di salah satu istrinya sesuai kesepakatan di dalam keluarga tersebut.

Tabel 41. Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Buleleng Tahun 2019

NO	Kecamatan	Jumlah KK	YANG SUDAH PUNYA KK			%	Belum Punya KK	%
			L	P	L+P			
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	GEROKGAK	29.303	25.934	2.718	28.652	97,78	651	2,22
2	SERIRIT	29.689	25.049	3.827	28.876	97,26	813	2,74
3	BUSUNGBIU	15.677	13.643	1.363	15.006	95,72	671	4,28
4	BANJAR	27.425	23.889	3.129	27.018	98,52	407	1,48
5	SUKASADA	25.618	22.378	2.594	24.972	97,48	646	2,52
6	BULELENG	45.597	38.958	6.112	45.070	98,84	527	1,16
7	SAWAN	24.987	21.390	2.921	24.311	97,29	676	2,71
8	KUBUTAMBAHAN	21.160	18.500	1.980	20.480	96,79	680	3,21
9	TEJAKULA	22.858	20.128	2.080	22.208	97,16	650	2,84
JUMLAH		**242.314**	**209.869**	**26.724**	**236.593**	**97,64**	**5.721**	**2,36**

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng, Desember 2019, Diolah.

Dari tabel. 41 menggambarkan bahwa dari 242.314 jumlah keluarga yang ada di Kabupaten Buleleng (Wajib KK), yang sudah memiliki dokumen Kartu Keluarga (Kartu KK) per 31 Desember 2019 sebanyak 236.593 keluarga atau baru mencapai 97,64%. Jika dilihat per kecamatan, persentase kepemilikan Kartu Keluarga tertinggi terdapat di Kecamatan Buleleng sebesar 98,84%, Kecamatan Banjar 98,52%, Kecamatan Gerokgak

mencapai angka 97,78%, disusul oleh Kecamatan Sukasada dengan angka 97,48%, Kecamatan Sawan 97,29%, Kecamatan Seririt 97,26%. Kecamatan Tejakula sebesar 97,16%, Kecamatan Kubutambahan 96,79%, dan Kecamatan Busungbiu sebanyak 95,72%.

Jadi kepemilikan KK bagi warga masyarakatyang sudah kawin di Kabupaten Buleleng rata-rata mencapai 97,64%, terutama warga masyarakat di wilayah Kecamatan Buleleng, Banjar, Busungbiu, Gerokgak, Sukasada, Sawan, Seririt, dan Tejakula sedangkan di 4 kecamatan masing-masing Kecamatan Kubutambahan dan Busungbiu, masih perlu ditingkatkan kesadaran masyarakatnya terhadap kepemilikan KK sangat bermanfaat sekali dalam urusan program Kesehatan, Perbankan, Sekolah, Bisnis/usaha dan lain-lain. Upaya peningkatan jumlah kepemilikan Kartu Keluarga akan memiliki dampak terhadap peningkatan kepemilikan KTP, oleh karena itu perlu diupayakan kegiatan penyuluhan kepada para penyelenggara administrasi kependudukan di tingkat Desa/ Kelurahan dan masyarakat secara luas melalui berbagai media penyuluhan seperti melalui tatap muka, radio, spanduk, baliho, stiker, banner dan lain-lain media.

5.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)

KTP Elektronik atau E-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di E-KTP akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM),

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan pasal 6 Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Jo Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk;
2. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan;
3. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan;
4. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan Untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di Instansi Pelaksana).
5. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;
6. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Manfaat E-KTP yang ingin dicapai adalah sebagai identitas jati diri tunggal, tidak dapat dipalsukan, tidak dapat digandakan, dan dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada. Untuk itu E-KTP dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti relief text, microtext, filter image, invisible ink dan warna yang berpendar di bawah sinar ultra violet serta anti copy design. Penyimpanan data di dalam chip sesuai dengan standar internasional NISTIR 7123 dan Machine Readable Travel Documents ICAO 9303 serta EU Passport Specification 2006. Bentuk KTP elektronik sesuai dengan ISO 7810 dengan form factor ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm.

Mengapa harus E-KTP? Hal tersebut (E-KTP) dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara KTP-nya. Beberapa diantaranya telah digunakan untuk menduplikasi menghindari pajak, pembuatan paspor palsu, mengamankan korupsi, menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris).

Dengan memiliki E-KTP penduduk yang bersangkutan akan dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan ke legalitasan seseorang serta memudahkan penduduk memperoleh layanan sosial dan ekonomi dasar lainnya seperti urusan sertifikat tanah, mengurus perkawinan, mencari pekerjaan, urusan perbankan dan sebagainya.

Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk, dapat dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ KTP} = \frac{\sum Pddk_{\ memiliki\ KTP}}{\sum Pddk\ Wajib\ KTP} \text{ x } 100\%$$

Tabel 42. Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Buleleng Tahun 2019.

NO	KECAMATAN	WAJIB KTP			YANG SUDAH PUNYA KTP			%
		L	P	L+P	L	P	L+P	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	GEROKGAK	35.570	35.785	71.355	34.925	34.745	69.670	97,64
2	SERIRIT	35.827	36.723	72.550	33.926	34.493	68.419	94,31
3	BUSUNGBIU	20.808	21.163	41.971	20.291	20.475	40.766	97,13
4	BANJAR	33.355	33.652	67.007	32.298	32.647	64.945	96,92
5	SUKASADA	32.352	32.769	65.121	31.672	31.889	63.561	97,60
6	BULELENG	55.830	56.306	112.136	56.183	56.486	112.669	100,48
7	SAWAN	30.691	31.065	61.756	29.977	30.198	60.175	97,44
8	KUBUTAMBAHAN	26.497	25.890	52.387	26.472	25.760	52.232	99,70
9	TEJAKULA	28.869	28.001	56.870	27.931	26.923	54.854	96,46
JUMLAH		**299.799**	**301.354**	**601.153**	**293.675**	**293.616**	**587.291**	**97,69**

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng, 2019, Diolah

Pada tabel 42 menyajikan data penduduk wajib KTP dan Jumlah penduduk yang sudah punya KTP tahun 2019. Informasi penting yang dapat disampaikan dari data tersebut adalah sebagai berikut dari 601.153 orang penduduk wajib KTP, yang sudah memiliki KTP sebanyak 587.291 orang atau 97,69%. Kecamatan dengan prosentase penduduk yang telah memiliki KTP terbanyak ada di Kecamatan Buleleng dengan angka 100,48%, disusul oleh Kecamatan Kubutambahan 99,70%, Kecamatan Gerokgak 97,64%, Kecamatan Sukasada 97,60%, Kecamatan Sawan 97,44%, Kecamatan Busungbiu 97,13%, Kecamatan Banjar 96,92%, Kecamatan Tejakula 96,46%, Kecamatan Seririt prosentase kepemilikan KTP yaitu 94,31%.

Upaya peningkatan kepemilikan KTP oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Camat, Lurah/Kepala Desa dengan sistem jemput bola ke desa-desa, sekolah-sekolah, fasilitas-fasilitas umum, diharapkan dapat meningkatkan kepemilikan KTP di Kabupaten Buleleng.

5.3 Kepemilikan Akta

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia karena akta merupakan pengakuan negara atas status keperdataaan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Akta-akta yang dimaksud meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian.

5.3.1 Akta Kelahiran

Akta Kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya sebab dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan hanya akan dicantumkan nama ibunya sehingga dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja.

Persentase kepemilikan akta kelahiran berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran, dapat dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ AL} = \frac{\sum Pddk_{memilikiAL}}{\sum Penduduk} \text{ x } 100\ \%$$

Tabel 43. Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Buleleng Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah penerbitan Akta Kelahiran		
		L	P	L+P
	2	3	4	5
1	Gerokgak	33.994	17.158	51.152
2	Seririt	32.728	22.695	55.423
3	Busungbiu	15.336	11.684	27.020
4	Banjar			44.333

		26.673	17.660	
5	Sukasada	34.824	21.520	56.344
6	Buleleng	54.523	30.538	85.061
7	Sawan	31.883	18.329	50.212
8	Kubutambahan	26.643	14.866	41.509
9	Tejakula	29.307	15.245	44.552
Kabupaten Buleleng Tahun 2019		**285.911**	**169.695**	**455.606**

Sumber : Database Disdukcapil Kab.Buleleng, 2019.

Tabel 43 menampilkan data jumlah akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pancatatan Sipil Kabupaten Buleleng selama tahun 2019. Tercatat sebanyak 455.606 akta. Penerbitan akta kelahiran terbanyak terjadi di Kecamatan Buleleng dengan jumlah 85.061 lembar, kemudian disusul Kecamatan Sukasada sebanyak 56.344 lembar, Kecamatan Seririt 55.423 lembar, Kecamatan Gerokgak 51.152 lembar, Kecamatan Sawan 50.212 lembar, Kecamatan Tejakula 44.552 lembar, Kecamatan Banjar 44.333 lembar, Kecamatan Sawan 4.465 lembar, Kecamatan Kubutambahan 41.509 lembar, dan Kecamatan Busungbiu 27.020 lembar.

Tabel 44. Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran di Kabupaten Buleleng Tahun 2014 - 2019.

No	Tahun penerbitan Akta Kelahiran	Jumlah
	2	3
1	Penerbitan akta tahun 2014	44.619
2	Penerbitan akta tahun 2015	44.041
3	Penerbitan akta tahun 2016	47.811
4	Penerbitan akta tahun 2017	47.811
5	Penerbitan akta tahun 2018	50.115
5	Penerbitan akta tahun 2019	455.606
6	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2019	455.606
7	Jumlah Penduduk Kab. Buleleng Tahun 2019	823.395
8	% Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2019	55,33

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kab. Buleleng, 2019, Diolah

Jika data tersebut ditambahkan dengan data registrasi jumlah akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sejak tahun 2014 - 2019 sebanyak 642.192 akta kelahiran. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 sebanyak 823.395 orang, jadi jumlah penduduk Kabupaten Buleleng yang telah memiliki akta kelahiran baru mencapai angka 55,33%.

Jumlah tersebut tentunya merupakan persentase yang masih kecil mengingat akta kelahiran wajib dimiliki oleh setiap penduduk warga negara Indonesia. Walaupun berbagai upaya telah dilaksanakan agar prosentase kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Buleleng terus meningkat dari tahun ke tahun, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buleleng masih harus terus bekerja keras agar semakin banyak penduduk yang memiliki akta kelahiran. Penyuluhan yang selama ini dilakukan melalui tatap muka, baru menyasar aparatur di Kecamatan dan Desa dan para bendesa adat, sasarannya perlu diperluas kepada masyarakat secara langsung dan tidak langsung melalui brosur dan radio. Pelayanan akta masal melalui system jemput bola ke desa-desa selama ini sudah berjalan baik juga masih perlu ditingkatkan frekuensinya. Hal tersebut tentunya harus didukung dengan dana operasional, sarana mobilitas dan jumlah tenaga yang memadai, sebab pelayanan di kantor pelayanan juga harus tetap berjalan. Hal lain yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah kemudahan dalam persyaratan dan proses penerbitan akta kelahiran, mendekatkan pelayanan akta kelahiran di Kecamatan dengan membentuk UPTD terutama pada kecamatan-kecamatan yang jauh dari pusat layanan seperti Kecamatan Gerokgak, Busungbiu, Kubutambahan dan Tejakula.

Dari segi regulasi, upaya peningkatan jumlah kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Buleleng sangat dimungkinkan terlebih dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada regulasi terbaru tersebut terdapat berbagai ketetapan yang memberikan kemudahan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan mulai dari pemerintah Desa, Kecamatan sampai pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku penerbit dokumen kependudukan. Beberapa diantaranya adalah ketentuan pada pasal 79A yang menyatakan bahwa "Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis), kemudian penerbitan Akta Kelahiran yang pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) tahun semula memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, melalui pasal 32 ayat 2 persyaratan tersebut dihapus, sebagai gantinya cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota setempat. Kemudahan lainnya yang diberikan kepada masyarakat saat ini adalah tentang Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa sudah diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk. Berbagai kemudahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan animo masyarakat untuk mengurus akta kelahiran.

5.3.2 Akta Perkawinan

Akta Perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat di dalammnya. Persentase kepemilikan akta perkawinan berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta perkawinan, dapat dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ AK} = \frac{\sum Pddk_{memilikiAK}}{\sum Pddk_{berstatuskawin}} \text{ x } 100\ \%$$

Tabel 45 Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan Kabupaten Buleleng Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah penerbitan Akta Perkawinan
	2	3
1	Gerokgak	15.095
2	Seririt	16.174
3	Busungbiu	7.916
4	Banjar	17.230
5	Sukasada	15.828
6	Buleleng	20.540
7	Sawan	14.853
8	Kubutambahan	15.248
9	Tejakula	14.733
Jumlah		**137.617**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buleleng, 2019.

Berdasarkan Tabel 45 di atas jumlah akta perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng selama tahun 2019 tercatat sebanyak 137.617 akta perkawinan. Penerbitan akta perkawinan terbanyak terjadi di Kecamatan Buleleng dengan jumlah 20.540 akta, Kecamatan Banjar dengan jumlah

17.230 akta, Seririt dengan jumlah 16.174 akta, kemudian disusul oleh Kecamatan Sukasada dengan jumlah 15.828 akta, Kecamatan Kubutambahan dengan jumlah 15.248 akta, Kecamatan Gerokgak dengan jumlah 15.095 akta, Kecamatan Sawan dengan jumlah 14.863 akta, Kecamatan Tejakula dengan jumlah 14.733 akta, dan Kecamatan Busungbiu dengan jumlah 7.916 akta perkawinan.

Tabel 46 Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Penduduk Berstatus Kawin di Kabupaten Buleleng Tahun 2014 - 2019

No	Tahun penerbitan akta Perkawinan	Jumlah
	1	2
1	Penerbitan akta tahun 2014	15.850
2	Penerbitan akta tahun 2015	14.426
3	Penerbitan akta tahun 2016	27.945
4	Penerbitan akta tahun 2017	27.945
5	Penerbitan akta tahun 2018	25.683
6	Penerbitan akta tahun 2019	137.617
7	Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan Tahun 2019	137.617
8	Jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2019	823.395
9	% Kepemilikan Akta Perkawinan Tahun 2019	16,71

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kab. Buleleng, 2019

Jika data tersebut ditambahkan dengan data registrasi jumlah akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sejak tahun 2014 - 2019 sebanyak 249.466 akta perkawinan sebagaimana data yang tertuang pada tabel 46 di atas. Dengan jumlah penduduk yang berstatus kawin kabupaten

Buleleng pada tahun 2019 sebanyak 561.452 orang, maka jumlah penduduk Kabupaten Buleleng yang telah memiliki akta perkawinan baru mencapai 16,71%.

Berdasarkan angka-angka tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan jumlah kepemilikan akta perkawinan bagi penduduk berstatus kawin di Kabupaten Buleleng tingkat kesadaran penduduk tetap perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan di kecamatan dan desa-desa yang melibatkan pengurus Desa Adat dan Desa Dinas bahkan juga masyarakat dalam arti luas, hal tersebut sangat penting mengingat saat ini di kalangan masyarakat di Kabupaten Buleleng sebagian besar dari mereka baru mengurus akta perkawinan jika anak-anaknya membutuhkan akta kelahiran.

Pelaksanaan pelayanan akta jemput bola ke desa-desa melalui program akta massal dilaksanakan sejak tahun 2013. Pencatatan Sipil Kab. Buleleng di tahun 2019 pelayanan tersebut merupakan cara yang paling efektif meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka kepemulihan dokumen akta perkawinan. Namun demikian di lapangan banyak dijumpai keadaan dimana pasangan suami istri belum dapat membuat akta perkawinan karena harus melengkapinya dengan putusan pengadilan dan mereka mengatakan tidak mampu menyediakan biaya yang cukup besar untuk mengurusnya di kantor pengadilan.

5.3.3 Akta Perceraian

Akta perceraian wajib dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai hidup atau cerai mati. Persentase kepemilikan akta perceraian berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta perceraian, dan dapat dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ AC} = \frac{\sum Pddk_{\text{memiliki AC}}}{\sum Pddk_{\text{berstatus cerai}}} \text{ x } 100$$

Tabel 47 Jumlah Penerbitan Akta Perceraian di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Berdasarkan Kecamatan.

No	Kecamatan	Jumlah penerbitan Akta Perceraian
	2	3
1	Gerokgak	443
2	Seririt	687
3	Busungbiu	424
4	Banjar	547
5	Sukasada	657
6	Buleleng	1.552
7	Sawan	621
8	Kubutambahan	403
9	Tejakula	444
JUMLAH		**5.778**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buleleng, 2019

Menyimak angka jumlah penerbitan akta perceraian di Kabupaten Buleleng sebagai tabel 47 di atas terlihat bahwa proses perceraian yang sah secara hukum yang sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dan telah diterbitkan akta perceraiannya selama tahun 2019 tercatat sebanyak 547 peristiwa. Dari jumlah tersebut terbanyak ada di Kecamatan Buleleng dengan penerbitan sebanyak 135 akta perceraian, kemudian disusul Kecamatan Seririt dan Sukasada dengan 68 akta perceraian dan Kecamatan Sawan dengan 63 akta perceraian, Kecamatan Banjar 54 akta perceraian, Kecamatan Gerokgak 43 akta perceraian, Kecamatan Tejakula 41 akta perceraian, Kecamatan Kubutambahan 39 akta perceraian, dan paling rendah Kecamatan Busungbiu 36 akta perceraian.

Tabel 48. Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Perceraian Penduduk Berstatus Kawin di Kabupaten Buleleng Tahun 2014 - 2019

No	Tahun penerbitan akta Perceraian	Jumlah
	2	3
1	Penerbitan akta tahun 2014	201
2	Penerbitan akte tahun 2015	258
3	Penerbitan akta tahun 2016	397
4	Penerbitan akta tahun 2017	741
5	Penerbitan akta tahun 2018	756
6	Penerbitan akta tahun 2019	5.778
7	Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian Tahun 2019	5.778
8	Jumlah KK Status Cerai Tahun 2019	11.017
9	% Kepemilikan Akta Perceraian Tahun 2019	52,45

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng,2019, Diolah

Tabel 48 menggambarkan jumlah penduduk berstatus cerai yang memiliki akta perceraian dari tahun 2014 - 2019 sebanyak 8.131 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk berstatus cerai pada tahun 2018 sebanyak 756 orang maka persentase kepemilikan akta perceraian mencapai 52,45%. Angka tersebut diperoleh dengan asumsi bahwa yang mengurus akta perceraian adalah mereka yang menyandang status cerai hidup dan cerai mati.

Masih banyaknya kepala keluarga berstatus cerai yaitu cerai hidup dan cerai mati tidak mengurus akta perceraian perlu mendapatkan perhatian yang serius. Ada fakta di tengah masyarakat bahwa banyak penduduk yang pasangannya telah meninggal tetapi belum memiliki akta perceraian, demikian juga banyak perceraian yang dilakukan secara adat tapi belum memiliki akta perceraian. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan kepemilikan akta perceraian di kabupaten Buleleng, perlu ada pemikiran dan dituangkan menjadi program dan kegiatan dan tentunya didukung dengan kemauan baik dari pihak-pihak terkait untuk memberikan kemudahan dalam penerbitan putusan pengadilan dan proses penerbitan akta perceraian terutama bagi pasangan yang mengalami cerai hidup yang telah berumur 45 tahun ke atas. Hal tersebut sangat logis dilaksanakan sebab mereka kecil kemungkinan untuk kembali kawin.

Peningkatan animo kepemilikan akta perceraian bagi kepala keluarga dengan status cerai mati yang jumlahnya mencapai 20.135 orang sangat mungkin dapat ditingkatkan kesadarannya dengan membuat program yaitu pelayanan akta kematian dan akta perceraian secara khusus. Oleh karena itu pemanfaatan database penduduk yang berstatus cerai mati di tiap desa/kelurahan setempat sebagai langkah awal akan dapat mempercepat pencapaian tujuan. Dengan demikian maka penduduk yang salah satu

pasangannya sudah meninggal dengan surat keterangan meninggal dari desa/kelurahan setempat dapat diterbitkan akta kematian dan akta kematian tersebut digunakan sebagai dasar penerbitan akta perceraian.

5.3.4 Akta Kematian

Persentase kepemilikan akta kematian berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta kematian, dapat dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ AM} = \frac{\sum Pddk_{memilikiAM}}{\sum Pddk_{mati}} \text{ x } 100\%$$

Tabel 49 Jumlah Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Buleleng tahun 2019 Berdasarkan Kecamatan.

No	Kecamatan	Jumlah penerbitan Akta Kematian
	2	3
1	Gerokgak	521
2	Seririt	601
3	Busungbiu	470
4	Banjar	486
5	Sukasada	411
6	Buleleng	779
7	Sawan	405

8	Kubutambahan	360
9	Tejakula	582
Kabupaten Buleleng Tahun 2019		**4.615**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buleleng, 2019

Tabel 49 menyajikan jumlah akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019 sebanyak 4.615 akta kematian. Dilihat berdasarkan kecamatan, penerbitan akta kematian terbanyak ada di Kecamatan Buleleng sebanyak 779 akta kematian, Kecamatan Seririt dengan 601 akta kematian, Kecamatan Tejakula dengan 582 akta kematian, dan kecamatan dengan akta kematian paling rendah ada di Kecamatan Sawan dan Kubutambahan yaitu dengan 405 dan 360 akta kematian.

Tabel 50 Jumlah Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Buleleng tahun 2014 - 2019

No	Tahun penerbitan akta Kematian	Jumlah
	2	3
1	Penerbitan akta tahun 2014	382
2	Penerbitan akta tahun 2015	1.808
3	Penerbitan akta tahun 2016	2.550
4	Penerbitan akta tahun 2017	4.137
5	Penerbitan akta tahun 2018	9.268
6	Penerbitan akta tahun 2019	4.615

7	Jumlah Penerbitan Akta Kematian Tahun 2019	4.615
8	Jumlah Penduduk Cerai Mati Tahun 2019	20.135
9	% Kepemilikan Akta Kematian Tahun 2019	22,92

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng, 2019, Diolah

Sementara itu berdasarkan data pada table 50 diketahui bahwa jumlah akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sejak tahun 2014 hingga 2019 baru mencapai 22.760 akta kematian. Angka tersebut tentunya merupakan angka yang cukup rendah bila dibandingkan dengan jumlah kematian penduduk tiap saat yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan cara yang sama seperti dimaksudkan dalam peningkatan kepemilikan akta perceraian maka kepemilikan akta kematian tentunya akan dapat ditingkatkan. Inovasi program kegiatan agar kesadaran masyarakat melaporkan peristiwa kematian anggota keluarganya semakin meningkat perlu dilakukan. Salah satunya adalah dengan menugaskan Kelian Desa Adat/Banjar Adat atau Kelian Tempekan adat agar meneruskan data penduduk yang meninggal ke Desa Dinas, kemudian desa dinas menerbitkan surat keterangan meninggal sebagai lampiran pelaporan penduduk yang meninggal kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buleleng. Dengan data tersebut kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buleleng menerbitkan akta kematian sekaligus dapat mengupdate databasenya. Dengan cara demikian maka jumlah penerbitan akta kematian tentunya bisa ditingkatkan.

5.3.5 Akta Pengakuan Anak

Pengakuan anak merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut. Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara.

Persentase akta pengakuan anak berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta pengakuan anak, dapat dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ A.PA} = \frac{\sum Pddk_{\,memiliki\ A.PA}}{\sum Jml\ pddk} \text{ x } 100\ \%$$

Tabel 51 Jumlah Penerbitan Akta Pengakuan Anak di Kabupaten Buleleng Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah	Persentase (%)
1	Gerokgak	29	0,03
2	Seririt	48	0,05
3	Busungbiu	8	0,01
4	Banjar	116	0,13
5	Sukasada	113	0,12
6	Buleleng	91	0,06
7	Sawan	38	0,04
8	Kubutambahan	17	0,02
9	Tejakula	10	0,01
JUMLAH		**470**	**0,06**

Tabel 51 menyajikan jumlah akta pengakuan anak yang diterbitkan oleh Disdukcapil tahun 2019 sebanyak 470 Akta PA dilihat berdasarkan kecamatan, penerbitan Akta Pengakuan Anak terbanyak ada di Kecamatan Banjar sebanyak 116 Akta PA, Kecamatan Sukasada 113 Akta PA, Kecamatan Buleleng 91 Akta PA, Kecamatan Seririt 48 Akta PA, Kecamatan Sawan 38 Akta PA, Kecamatan Gerokgak 29 Akta PA, Kecamatan Kubutambahan 17 Akta PA, Kecamatan Tejakula 10 Akta PA, dan Kecamatan Busungbiu 8 Akta PA.

Tabel 52 Jumlah dan persentase kepemilikan Akta Pengakuan Anak di Kabupaten Buleleng Tahun 2014 - 2019

No	Tahun penerbitan akta pengakuan anak	Jumlah
	1	2
1	Penerbitan akta tahun 2014	3
2	Penerbitan akta tahun 2015	28
3	Penerbitan akta tahun 2016	107
4	Penerbitan akta tahun 2017	227
5	Penerbitan akta tahun 2018	230
6	Penerbitan akta tahun 2019	470
7	Jumlah Penerbitan Akta PA Tahun 2019	470
8	Jumlah Penduduk Tahun 2019	823.395
9	% Kepemilikan Akta Pengakuan Anak Tahun 2019	0,06

Berdasarkan data tabel 52 diketahui bahwa jumlah Akta Pengakuan Anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sejak tahun 2014 hingga 2019 baru mencapai 1.065 Akta Pengakuan Anak. Angka tersebut tentunya merupakan angka yang cukup rendah bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Buleleng. Untuk meningkatkan kepemilikan Akta Pengakuan Anak di Kabupaten Buleleng perlu adanya Inovasi program kegiatan agar masyarakat sadar akan melaporkan peristiwa tersebut.

5.3.6 Akta Pengesahan Anak

Pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut Hukum Negara.

Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng) paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.

Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Buleleng tahun 2019 ini disamping sebagai output pemanfaatan data kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kurun waktu tanggal 1 Januari 2019 hingga tanggal 31 Desember 2019 pukul 17.00 Wita sesuai dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, juga merupakan hasil pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala kabupaten sebagaimana maksud pasal 7 huruf "g" Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Data dan informasi yang disajikan dalam profil ini telah di aplikasikan pada beberapa indikator kependudukan, pendidikan, kesehatan dan ekonomi sehingga diharapkan memberikan gambaran yang lebih luas dan merupakan cerminan hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian, kedepan diharapkan data-data yang terdapat dalam profil ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan karena pembangunan dilaksanakan pada intinya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk itu sendiri, sehingga segala kegiatan harus berbasiskan data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar kebijakan, program dan kegiatan semakin tepat sasaran maka data-data kependudukan yang dibutuhkan harus semakin lengkap, akurat dan valid. Dengan demikian disamping dibutuhkan dukungan data dari SKPD terkait, hal yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat masyarakat untuk melaporkan segala peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialaminya berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pindah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga data perseorangan dan data agregat kependudukan yang tersimpan dalam database kependudukan akan semakin up to date/valid.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialaminya mulai dari Desa, kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng disamping dari segi regulasi terbaru (UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) sudah ada beberapa kemudahan seperti pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis), penerbitan akta pencatatan sipil semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa penting sekarang penerbitannya di lakukan di tempat domisili penduduk, penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) tahun semula memerlukan penetapan Pengadilan Negeri sekarang cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, perlu pula berbagai terobosan seperti :

1) Pembentukan UPTD kecamatan dengan kewenangan menerbitkan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk Kabupaten Buleleng rintisan UPT

diupayakan ada di kecamatan yang jauh dari kota seperti kecamatan Tejakula, Busungbiu dan Gerokgak;

2) Mengadakan Petugas Registrasi yang membantu Kepala Desa/Lurah dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tiap desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3) Pengadaan unit kendaraan untuk mobil keliling Layanan E-KTP dan mobil keliling layanan akta catatan sipil;
4) Peningkatan frekuensi pelayanan akta massal jemput bola ke desa-desa;
5) Membuat MOU dengan Pengadilan Negeri Singaraja agar ada Sidang di Kecamatan, MOU dengan sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, klinik-klinik bersalin untuk pelayanan akta.
6) Pembuatan program "MASYARAKAT BULELENG SADAR KEPEMILIKAN KTP DAN AKTA" yang didukung oleh seluruh komponen lapisan masyarakat, swasta dan Pemerintah Daerah.
7) Peningkatan frekuensi dan sasaran penyuluhan tatap langsung.
8) Diversifikasi metode penyuluhan melalui radio, brosur, media cetak dan website.
9) Membuka counter layanan pengaduan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang *Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil*, 2012;

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang *Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil*, 2012;

Buleleng Dalam Angka 2019, *Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng.*

Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Buleleng Tahun 2012, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng 2013.

Laporan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2019, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.